

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijaksanaan moneter di Indonesia berperan untuk menjaga dan memelihara kestabilan moneter, diharapkan juga dapat untuk mendukung terciptanya sasaran pemerintah yakni, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja yang semuanya diusahakan dalam suatu keserasian, keselarasan, keseimbangan sesuai prioritas yang lebih ditetapkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) pun naik cukup tinggi sehingga akumulasi simpanan secara nasional memperlihatkan kenaikannya yang cukup berarti. Peningkatan yang cukup ini tentunya sangat diharapkan, dalam arti bahwa dana masyarakat dapat digali dan dapat dipergunakan untuk pembiayaan investasi dan pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu perlu dikatakan mengenai tekad pemerintah dalam rangka membiayai pembangunan nasional.

Fungsi perbankan disini sangat diperlukan guna melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang moneter, sebab perbankan disini memegang peran penting dalam pengumpulan dana dari masyarakat dan akhirnya disalurkan kembali kepada masyarakat.

Kondisi perbankan nasional saat ini merupakan hasil dari proses perjalanan panjang perbankan yang telah melewati serangkaian kebijakan yang dibuat oleh otoritas moneter. Otoritas moneter terdiri dari bank sentral (Bank Indonesia) dan Pemerintah Pusat, dalam hal pemerintah melakukan kegiatan atau fungsi moneter. Sedangkan bank-bank umum beserta otoritas moneter merupakan sistem moneter di Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan Agustus 1997 sampai sekarang menyebabkan bank-bank umum satu per satu mengalami kesulitan likuiditas yang diikuti dengan memburuknya kinerja bank-bank umum tersebut. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya dana tanpa diimbangi penghasilan dari kegiatan penyaluran kredit.

Sedangkan kondisi buruk yang dialami bank-bank umum dalam krisis moneter ini adalah tekanan suku bunga dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Di lain pihak bank-bank umum mengalami peningkatan kredit bermasalah serta memiliki kewajiban dalam valuta asing yang jatuh tempo. Hal ini sangat menyulitkan karena bank-bank tersebut juga mengalami kekurangan likuiditas akibat penarikan uang secara besar-besaran. Keadaan seperti inilah yang mendorong hancurnya sistem perbankan nasional.

Kondisi perekonomian diharapkan mendapat titik terang dengan mulai bangkitnya bank-bank yang direkapitalisasi yang didukung oleh pemerintah dalam bentuk setoran modal. Hal ini perlu diperhatikan karena operasional perbankan sangat besar pengaruhnya terhadap proses pemulihan ekonomi,

dengan harapan bahwa bank-bank tersebut dapat mengembangkan aktivitas usahanya.

Tidak terlepas dari konsepsi dasar pengelolaan bank umum yaitu tujuan jangka pendek. Di mana tujuan jangka panjang suatu bank umum adalah mencari laba, sedangkan tujuan jangka pendek adalah harus selalu menjaga kestabilan dana. Untuk itu bank-bank harus tetap menjaga kualitas pelayanannya dan mampu memperluas jangkauan ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam periode yang sangat singkat pertumbuhan bank – bank di Indonesia meningkat pesat, sementara bank – bank yang telah lama beroperasi mambuka kantor cabangnya hampir disemua kota besar di Indonesia. Sector perbankan juga dipengaruhi oleh masuknya lembaga – lembaga keuangan non bank menjadi bank umum. Perkembangan bank – bank yang sangat ekspansif tentu saja akan mempengaruhi tingkat kompetisi, baik dalam pengerahan dana masyarakat maupun penyaluran kredit. Dilain pihak nasabah bank sudah cukup jeli dalam melakukan pilihan atas pelayanan jasa dan produk yang ditawarkan

Bank sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Semakin banyak dana yang dihimpun oleh bank semakin banyak pula pinjaman yang diberikan oleh bank. Bank menarik dana masyarakat dalam bentuk Tabungan, Deposito, dan Giro. Dan menyalurkan kembali dalam bentuk Kredit.

Kredit yang diberikan oleh suatu bank sangat menunjang pertumbuhan ekonomi. Karena pinjaman ini mampu meningkatkan penghasilan para kreditur sehingga secara otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan penghasilan yang banyak maka tabungan akan meningkat. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan penghimpunan dana. Salah satu usaha peningkatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank adalah dengan memberikan hadiah bagi penabung di bank tersebut, serta pemberian suku bunga deposito yang bersaing dengan bank-bank lainnya dan didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap nasabahnya.

Untuk itulah suatu bank perlu mengenali beberapa faktor yang merupakan kekuatan dan kelemahannya agar dapat memberikan kepuasan kepada nasabahnya. dan faktor – faktor yang perlu diperhatikan oleh manajemen bank antara lain tersedianya produk dengan sistem dan prosedur yang cepat, lokasi yang mudah dijangkau oleh nasabahnya, tingkat bunga yang mencerminkan harga yang wajar, pelayanan yang memuaskan nasabah, fasilitas yang mendukung penyampaian jasa perbankan, tingkat keamanan yang dirasakan oleh nasabahnya. Sebagai lembaga yang mendasarkan diri pada kepercayaan masyarakat, bank juga perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh nasabahnya dengan baik.

Seiring dengan pembangunan ekonomi Indonesia membutuhkan lembaga keuangan perbankan yang lebih banyak dan menjangkau daerah operasi maupun akses terhadap sumber dana dan pembiayaan. Dana – dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan dana yang terbesar yang

paling diandalkan bank dan terdiri dari tiga jenis yaitu (Drs.M.Sinungan:1990:63) :

- a. Giro
- b. Deposito
- c. Tabungan

Kelebihan deposito berjangka adalah tingginya tawaran bunga yang diajukan oleh bank. Selain itu keyakinan para deposan bahwa pada saat jatuh tempo bila tidak ingin diperpanjang, maka dananya dapat ditarik kembali.

Bank juga menyukai deposito berjangka, dikarenakan bank akan mempunyai suatu jangka waktu yang cukup untuk investasi lainnya, sehingga dapat memperoleh keuntungan dari selisih tingkat suku bunga deposito dengan tingkat suku bunga pinjaman. Deposito berjangka mempunyai periode tertentu antara lain 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Tiap periode mempunyai tingkat suku bunga yang berbeda – beda tergantung ketentuan masing – masing bank.

Penulis memfokuskan kepada deposito berjangka pada bank pemerintah karena bank pemerintah dapat menjadi agen pembangunan yang digunakan oleh pemerintah untuk merealisasikan peraturan pemerintah untuk tujuan pembangunan. Selain itu fluktuasi tingkat suku bunga deposito pada bank pemerintah relatif lebih stabil.

Tabel 1.1
Perkembangan Deposito dan laju pertumbuhan Deposito
berjangka 3 bulan Pada Bank Pemerintah
Tahun 1985 - 2002

Tahun	Deposito (milyar)	Laju pertumbuhan Deposito (%)
1985	694	-
1986	800	15.27
1987	1879	134.8
1988	2295	22.13
1989	2099	-8.54
1990	1948	-7
1991	3366	72.79
1992	3988	18.47
1993	3280	-17.7
1994	2914	-11.1
1995	3827	31.3
1996	3667	-4.18
1997	10701	191.8
1998	23753	121.8
1999	24035	1.18
2000	37672	15.7
2001	47292	25.5
2002	43544	-7.9

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

Dengan melihat tabel diatas perkembangan deposito pada Bank pemerintah cenderung meningkat dapat kita lihat pada tahun 1985 – 1990 pertumbuhan deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah rata – rata 31.3 % pertahun. Dan dalam tahun 1991 – 1997 pertumbuhannya 40.19 % pertahun ini meningkat dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh semakin randahnya tingkat inflasi sehingga minat masyarakat untuk menabung dalam bentuk deposito berjangka 3 bulan semakin tinggi dan jumlah deposito pun meningkat. Dalam tahun 1998 – 2002 pertumbuhan deposito berjangka 3 bulan ini 39.4

ini menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 40.19 %. Penurunan ini disebabkan karena tingkat inflasi pada tahun 1998 cukup tinggi yaitu sebesar 77.63 % yang menyebabkan minat untuk menabung dalam bentuk deposito menurun. Tetapi setelah tahun 1998 inflasi menurun drastis menjadi 2.01 % membuat masyarakat ingin menabung dan ini dibuktikan naiknya jumlah deposito setiap tahunnya.

Penulis mengambil masalah deposito berjangka 3 bulan dengan asumsi, deposito berjangka 3 bulan ini dikarenakan selain mendapatkan suku bunga deposito yang tinggi dari deposito jangka lainnya, dan juga masyarakat tidak akan terlalu lama menyimpan dananya di bank dibandingkan dengan deposito berjangka lainnya. Misalnya masyarakat ingin mengambil uangnya dan menggantinya kedalam bentuk lain dengan cepat terlaksana karena dana bisa cepat ditarik kembali setelah masa 3 bulan. Bila tidak jadi ditarik karena lebih menguntungkan tetap didepositokan maka dapat memperpanjang lagi depositonya.

Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari PDB per kapita, tingkat suku bunga nominal, jumlah penduduk dan krisis moneter dalam mempengaruhi jumlah Deposito berjangka 3 bulan pada Bank Pemerintah, maka penulis memilih judul penelitian **“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH DEPOSITO BERJANGKA 3 BULAN PADA BANK PEMERINTAH KURUN WAKTU 1985–2002”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas maka muncul permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah PDB per kapita berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah ?
2. Apakah tingkat suku bunga nominal deposito berjangka 3 bulan berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah ?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah ?
4. Apakah krisis moneter berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah ?
5. Apakah PDB per kapita, tingkat suku bunga nominal , jumlah penduduk, dan krisis moneter secara bersama – sama mempengaruhi jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah ?

1.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis yang diajukan secara simultan adalah PDB per kapita, tingkat suku bunga nominal, jumlah penduduk dan krisis moneter yang mempengaruhi jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah. Sedangkan secara parsial hipotesis dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari PDB per kapita terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah.
2. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari tingkat suku bunga nominal terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah.
3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari jumlah penduduk terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah ?
4. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari krisis moneter terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah.
5. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara, PDB per kapita, tingkat suku bunga nominal, jumlah penduduk, dan krisis moneter (X_1, X_2, X_3, D) terhadap (Y) jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa seberapa besar PDB per kapita berpengaruh terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah.
2. Untuk menganalisa seberapa besar pengaruh suku bunga nominal deposito terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah.
3. Untuk menganalisa seberapa besar jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah.

4. Untuk menganalisa seberapa besar krisis moneter terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah
5. Untuk menganalisa seberapa besar pengaruh, PDB per kapita, tingkat suku bunga nominal, jumlah penduduk dan krisis moneter terhadap jumlah deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai tambahan informasi bagi prospek dan peranan bank dalam meningkatkan kinerjanya, guna mendapatkan keuntungan serta mendapatkan nasabahnya.
2. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa atau peneliti lainnya yang berhubungan dengan deposito
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

1.6 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Deposito yang diteliti adalah deposito pada bank pemerintah kurun waktu 1985 – 2002.
2. Tingkat suku bunga adalah tingkat suku bunga nominal deposito berjangka 3 bulan pada bank pemerintah kurun waktu 1985 – 2002.

3. Bank Pemerintah yang diteliti antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri

1.7 Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian dan untuk membuktikan benar tidaknya maka dalam penulisan ini akan menggunakan metode yaitu :

1.7.1 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam analisis ialah data yang didapat dari buku laporan dan studi kepustakaan atau data sekunder, antara lain :

1. Data statistik Badan Pusat Statistik
2. Laporan Bulanan BI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Jakarta.

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pencarian dan pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan angka – angka dan data – data sekunder dari berbagai bentuk laporan dan studi kepustakaan.

1.7.3 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis metode kuantitatif yaitu analisis yang menggunakan rumus – rumus dan teknik perhitungan yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah – masalah yang diteliti. Berdasarkan pada teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibentuk model sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, D)$$

Dimana :

Y = Deposito berjangka 3 bulan (Milyar Rp)

X1 = PDB per kapita (Rupiah)

X2 = Suku bunga nominal (%)

X3 = Jumlah penduduk (Ribu orang)

D = Dummy variable :

0 = Sebelum krisis moneter

1 = Setelah krisis moneter

Dari model diatas maka dapat dibentuk model ekonometri sebagai berikut:

$$\text{Log}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + \beta_3 \text{Log}X_3 + \beta_4 D$$

Persamaan diatas dapat diselesaikan dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), sebagai alat untuk menganalisis hubungan antar variabel digunakan alat bantu program komputer E-Views.

1.8 Pengujian Hipotesa

1.8.1 Pengujian hipotesis dari masing – masing variabel independen.

Untuk menguji tingkat signifikan hipotesis dari masing – masing variabel independen digunakan uji – t (t- test) dengan uji satu sisi (one tail), karena dalam hipotesis telah dijelaskan tanda hubungan antara

variabel independen yang positif dan negatif. Uji hipotesis satu sisi positif tersebut adalah sebagai berikut :

a. Hipotesa terhadap PDB per kapita (X1)

$H_0 : \beta_1 = 0$, tidak ada pengaruh antara PDB per kapita terhadap jumlah deposito

$H_a : \beta_1 > 0$, ada pengaruh positif dan signifikan antara PDB per kapita jumlah terhadap deposito

b. Hipotesa terhadap suku bunga nominal (X2)

$H_0 : \beta_2 = 0$, tidak ada pengaruh antara suku bunga nominal terhadap jumlah deposito

$H_a : \beta_2 > 0$, ada pengaruh positif dan signifikan antara suku bunga nominal terhadap jumlah deposito

c. Hipotesa terhadap jumlah penduduk (X3)

$H_0 : \beta_3 = 0$, tidak ada pengaruh antara jumlah penduduk terhadap jumlah deposito

$H_a : \beta_3 > 0$, ada pengaruh positif dan signifikan antara tingkat suku bunga nominal terhadap jumlah deposito

d. Hipotesa terhadap dummy variabel (D)

$H_0 : \beta_4 = 0$, tidak ada pengaruh antara dummy variabel terhadap jumlah deposito

$H_a : \beta_4 > 0$, ada pengaruh positif dan signifikan antara dummy variabel terhadap jumlah deposito.

$$t - \text{hitung} = \frac{\beta_1}{\text{Se } \beta_1}$$

dimana :

β_1 adalah koefisien regresi.

Se β_1 adalah standart error dari koefisien regresi.

Dengan menggunakan tingkat keyakinan (level of significance) atau α tertentu, $df = n - k$ ($df = \text{degree of freedom}$), apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak, berarti X mampu mempengaruhi variabel Y. (Damodar Gujarati;1993;39).

1.8.2 Pengujian hipotesa secara serempak.

Pengujian serentak semua koefisien regresi dilakukan dengan uji fisher (f – test) sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_n \neq 0$$

$$F - \text{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

R^2 adalah koefisien determinasi.

n adalah jumlah observasi.

k adalah jumlah variabel independen termasuk konstanta.

Dengan tingkat keyakinan α tertentu, $df = (k - 1, k - n)$, jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{-tabel}}$, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa uji serentak semua variabel independen yang digunakan dapat menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

1.8.3 Goodness of Fit

Pengujian ketepatan model regresi (Goodness of Fit) dilakukan dengan melihat angka R^2 . semakin R^2 mendekati 1 semakin tepat model yang digunakan . Dua sifat R^2 :

- a. R^2 merupakan besaran positif.
- b. Batasan adalah $0 < R^2 < 1$. suatu R^2 sebesar 1 berarti kecocokan sempurna. R^2 sama dengan 1 berarti garis regresi yang cocok adalah menjelaskan 100 % variabel Y. sebaliknya kalau R^2 sama dengan 0 (nol) maka berarti tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam Y tetapi R^2 terletak antara dua ekstrim ini. Kecocokan model dikatakan “ lebih baik “ kalau R^2 semakin mendekati 1.

1.8.4 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya Autokorelasi, Multikolinearitas dan Heterokedastisitas. Apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, uji t dan uji F yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara Statistik dapat mengacu kesimpulan yang diperoleh.

1.8.4.1 Pengujian Multikolinearitas

Salah satu dari fungsi asumsi klasik adalah bahwa tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel yang menjelaskan yaitu variabel yang ada dalam persamaan. Pada dasarnya multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas. Diinterpretasikan secara luas bahwa multikolinearitas berhubungan dengan situasi dimana ada hubungan linier baik itu yang pasti atau mendekati pasti diantara variabel. Koefisien regresi tak tentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinearitas mempunyai tingkat yang tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran regresi adalah mungkin, tetapi kesalahannya cenderung untuk besar. Sebagai hasilnya, nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat.

Pendeteksian multikoliniearitas dapat dilakukan dengan :

- a. Dengan melihat R^2 , ketika R^2 tinggi dan ketika korelasi derajat nol juga tinggi tetapi tak satupun atau sangat sedikit koefisien regresi parsial yang secara individual penting secara statistik atas dasar pengujian t yang konvensional. Jika R^2 tinggi, ini akan berarti bahwa uji F dari prosedur analisis varians dalam sebagian kasus akan menolak hipotesis nol, meskipun uji t sebaliknya.

- b. Dengan meregres salah satu penjelas dengan sisa variabel penjelas. Cara ini untuk mengetahui variabel yang mana yang berhubungan dengan variabel lainnya, karena multikolinearitas timbul karena satu atau lebih variabel yang menjelaskan merupakan kombinasi linier yang pasti dari variabel yang menjelaskan lainnya.

1.8.4.2 Pengujian Heterokedastisitas

Salah satu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa varians tiap unsur gangguan (disturbance, U_i), tergantung pada nilai yang dipilih dari variabel yang menjelaskan, adalah suatu angka yang konstan yang sama dengan σ_2 . Yaitu semua gangguan tadi mempunyai varians yang sama. Heteroskedasitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari observasi ke observasi lainnya. Heteroskedasitas dapat dideteksi dengan melakukan pengujian metode White

Adapun hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : tidak terdapat heteroskedastisitas

H_a : terdapat heteroskedastisitas

Secara manual uji ini dilakukan dengan meregres residual kuadrat (U_i^2) dengan variabel bebas. Dengan ini didapat nilai R^2 untuk menghitung X^2 , dimana $X^2 = n * R^2$. Pengujiannya adalah jika X^2 -hitung $<$ X^2 -table, maka dapat

dikatakan dalam persamaan tidak terjadi heteroskedastisitas atau H_0 diterima, jika X^2 -hitung $>$ X^2 -tabel maka dapat dikatakan terdapat heteroskedastisitas atau H_0 ditolak

1.8.4.3 Pengujian Autokorelasi

Satu lagi dari asumsi penting dari model linier klasik adalah bahwa kesalahan atau gangguan U_i yang masuk dalam fungsi regresi populasi adalah random atau tak berkorelasi. Konsekuensi adanya autokorelasi adalah penaksir tersebut tidak lagi efisien. Sebagai hasilnya, pengujian arti signifikan t dan f tidak dapat diterapkan secara sah. Jadi perlu diadakan perbaikan, perbaikannya tergantung pada sifat ketergantungan diantara gangguan U_i . Sebelum perbaikan dilakukan maka sebelumnya perlu diadakan pendeteksian. Maka untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

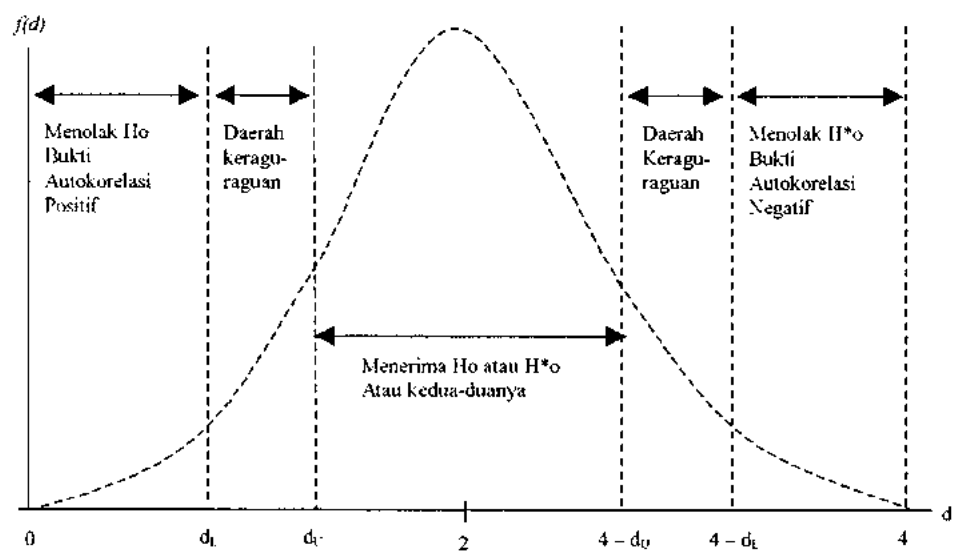
H_0 : berarti bahwa hipotesis nolnya tidak ada autokorelasi

H_a : berarti bahwa hipotesis alternatifnya adalah ada autokorelasi positif

Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah

- Bila nilai $D_w >$ daripada batas atas (U) maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, yang artinya tidak ada autokorelasi positif.
- Bila nilai D_w lebih rendah dari pada batas bawah (L) koefisien autokorelasinya lebih besar dari pada nol yang artinya adalah ada autokorelasi yang positif.
- Bila nilai DW terletak diantara batas bawah dan atas maka tidak dapat disimpulkan.

Gambar 1.1
Uji Durbin Watson



H_0 : Tidak ada autokorelasi positif

H^*_0 : Tidak ada autokorelasi negatif

Mekanisme tes Durbin-Watson adalah sebagai berikut, dengan mengasumsikan bahwa asumsi yang mendasari tes dipenuhi :

1. Lakukan regresi OLS dan dapatkan residual e_i .
2. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel yang menjelaskan tertentu, dapatkan nilai kritis dari d_L dan d_u .
3. Jika hipotesis H_0 adalah bahwa tidak ada serial korelasi positif, maka jika:

$$d < d_L \quad : \text{menolak } H_0$$

$$d > d_u \quad : \text{tidak menolak } H_0$$

$$d_L \leq d \leq d_u \quad : \text{pengujian tidak menyakinkan}$$

4. Jika hipotesis nol H_0 adalah bahwa tidak ada serial korelasi negatif, maka jika :

$$d > 4 - d_L \quad : \text{menolak } H_0$$

$$d < 4 - d_U \quad : \text{tidak menolak } H_0$$

$$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L \quad : \text{pengujian tidak meyakinkan}$$

5. Jika H_0 adalah dua-ujung, yaitu bahwa tidak ada serial autokorelasi baik positif ataupun negatif, maka jika :

$$d < d_L \quad : \text{menolak } H_0$$

$$d > 4 - d_L \quad : \text{menolak } H_0$$

$$d_U < d < 4 - d_U \quad : \text{tidak menolak } H_0$$

$$d_L \leq d \leq d_U \text{ atau } ; 4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$$

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Definisi mengenai bank ini pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank. Bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Bank adalah adalah badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

Prof. G.M.Verryn Stuart dalam bukunya *Bank politik* mengatakan “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan tujuan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memberedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.

A.Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa, “Bank adalah jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.

Definisi bank menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan adalah, "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri maupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Dilihat dari fungsinya, definisi tentang bank dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat.
 - b. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.
 - c. Simpanan dalam rekening koran/ giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis oleh bank.

Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasti dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

- 2) Bank dilihat dari pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut Mac Leod, *bank is a shop for the sale of credit*. Menurut R.G. Hawtrey, banking are merely dealers in credit. Jadi, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterima atau bersumber pada pendanaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.
3. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

2.2 Fungsi dan Tujuan Bank

keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat saat ini memiliki peran yang cukup penting. Hal ini didasarkan pada fungsi dari lembaga perbankan itu sendiri khususnya bank umum yang merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara.

Dalam bukunya yang berjudul "Kelembagaan Perbankan" karangan Thomas Suyatno dkk. Dijelaskan bahwa: bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan dalam menyimpan dana, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang

diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Kehadiran bank dirasakan semakin penting ditengah masyarakat. Hal ini semakin tampak jika diperhatikan dari fenomena transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dikalangan pebisnis dalam dekade terakhir ini. Sistem pembayaran yang dilakukan mengarah kepada sistem pembayaran giral yaitu menggunakan instrumen surat berharga khususnya dalam setiap kontrak atau perjanjian bisnis dimana sering ditemui klausula seperti Document Against Payment (DP) dan Document Against Acceptance (DA). Yang berarti pembayaran baru dilakukan apabila dokumen telah disepakati dan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Pembayaran tidak dilakukan dengan uang tunai melainkan dengan menggunakan instrumen surat berharga. Hal ini berarti keterlibatan perbankan dalam pembayaran harus diikuti sertakan sebab bank mempunyai instrumen untuk itu.

Bank sebagai lembaga keuangan yang mengelolah dana-dana masyarakat, sangat dituntut keahliannya untuk mengelola usaha ini karena apabila kepercayaan masyarakat terhadap bank maka masyarakat akan berlomba-lomba untuk menarik dana yang telah disimpan dibank. Akibatnya dampak yang lebih jauh dapat dilihat, kegiatan perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Arti pentingnya fungsi bank dirumuskan dalam pasal tersendiri. Dalam pasal 3 dan pasal 4 UU No 10 Tahun 1998 Tentang perbankan ditegaskan mengenai fungsi dan tujuan perbankan Indonesia yaitu:

1. Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti kehadiran bank sebagai suatu badan usaha, tidak semata-mata bertujuan bisnis namun ada misi lain yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (pasal 3)
2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (pasal 4).

Pengertian kedua pasal tersebut, jika dihubungkan dengan penjelasan umum undang – undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah bahwa perbankan nasional Indonesia mempunyai ciri khas jika dibandingkan dengan perbankan pada umumnya. Yang merupakan karakter perbankan nasional Indonesia. Dengan demikian perbankan nasional Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan yang melekat dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia yaitu :

1. Bank berfungsi sebagai “Financial Intermediary” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau memindahkan uang dari penabung kepada peminjam.
2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara yakni :
 - a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah bukan melaksanakan misi pembangunan golongan apalagi

perseorangan, jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (agent of development).

- b. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional yakni
 - Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan.
 - Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
 - Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinta tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3. Menerapkan prinsip kehati – hatian dalam mengelola suatu bank sesuai penjelasan umum undang – undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan cara :
 - a. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mendunia
 - b. Menyalurkan dana masyarakat kebidang – bidang yang produktif.
4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. Selain menerapkan prinsip kehati – hatian, juga pemenuhan kebutuhan persyaratan bank, serta sekaligus berfungsi untuk

mencegah terwujudnya praktek – praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian fungsi perbankan Indonesia tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpunan dan penyalur dana masyarakat atau perantara penghubung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera.

2.3 Jenis Bank dan Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank secara umum adalah pengumpulan dana, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan serta pemberian jasa keuangan lainnya misalnya berupa pemberian bank garansi, menyewakan tempat penyimpanan barang berharga (safe deposit box). Melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak dan sebagainya. Secara garis besar kegiatan jasa kegiatan jasa perbankan tersebut bila dilihat dari segi pendapatannya maka dikenal dengan jasa yang menghasilkan pendapatan berupa seperti pemberian kredit, dan pendapatan non bunga seperti transaksi valuta asing, bank garansi dan sebagainya

Ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku bahwa kegiatan usaha perbankan Indonesia harus sesuai dengan jenis banknya. Yaitu bahwa jenis bank menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank konvensional akan jauh berbeda

dengan usaha yang dilakukan bank berdasarkan prinsip syariah, begitu pula kegiatan bank umum akan banyak berbeda pula dengan usaha yang dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan kategori khusus yang dimilikinya maka pengelempokan bank dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Dilihat Dari Bidang Usahanya

Dalam pasal 5 ayat (1) undang – undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan mengenai bank menurut jenisnya dibagi 2 yakni :

1. Bank Umum

Hal ini dijabarkan dalam pasal 1 angka 3 undang – undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengemukakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha perbankan secara konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan. Makna usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dijabarkan dalam pasal 1 angka 13 Undang – undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan yakni prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menghimpun dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang – barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Ketentuan pasal 6 Undang – undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa usaha bank umum meliputi :

1. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito, Tabungan
2. Memberikan Kredit
3. Memberikan surat pengakuan hutang
4. Membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri amupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a. Surat – surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang sama berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat – surat yang dimaksud.
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat – surat yang dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

- e. Obligasi
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
 6. Mendapatkan dana pada, meminjam dana sendiri atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel, cek atau sarana lainnya.
 7. Menerima bayaran atas tagihan surat berharga, dan melakukan perhitungan dan atau antar pihak ketiga
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
 10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
 11. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah

12. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Selain dapat melakukan kegiatan diatas bank umum dapat pula melakukan kegiatan usaha dalam bidang :

1. Kegiatan Valuta Asing
2. Kegiatan penyertaan modal ventura, perusahaan Efek, serta lembaga kliring
3. Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia
4. Dana pensiun dengan pengurusan dana pensiun

Selain diberikan kebebasan berusaha, juga ditentukan kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh bank umum antara lain :

1. Melakukan penyertaan modal kecuali penyertaan modal untuk sementara dan penyertaan pada bank dan perusahaan lain dibidang keuangan
2. Melakukan kegiatan perasuransian
3. Melakukan usaha lain diluar kegiatan yang menjadi usaha utama dibidang perbankan sebagai mana jenis – jenis kegiatan usaha diatas

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam pasal 1 angka 4 Undang – undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan, bahwa Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip syariah yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Dalam hal menjalankan kegiatannya maka sesuai dengan pasal 13 Undang – undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank Perkreditan rakyat dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabahnya ber dasarkan prinsip syariah
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan atau tabungan pada bank lain.

Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha diatas juga ditentukan beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat diantaranya :

1. Menerima simpanan Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran

2. Melakukan kegiatan usaha dalam Valuta Asing
 3. Melakukan penyertaan modal
 4. Melakukan usaha perasuransian
2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi menjadi 2 yakni :

1. Bank Milik Pemerintah

Adalah bank yang memperoleh modal dari pemerintah. Kegiatan yang dijalankan oleh bank ini adalah usaha dibidang perbankan dalam arti yang luas dalam usaha lain dan usaha lain yang menunjang kegiatan tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank ini tidak memperoleh perlakuan yang istimewa dari pemerintah dibandingkan bank umum swasta nasional kecuali menyangkut pengangkatan direksi dan dewan komisaris bank sesuai dengan peraturan pemerintah mengatur penyesuaian bentuk hokum bank umum milik negara tersebut. Untuk pengangkatan pertama direksi dan dewan komisaris pada saat pendirian PT persero dari bank yang bersangkutan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan mendapat persetujuan dari Presiden.

Pengangkatan berikutnya dilakukan oleh rapat umum pemegang saham, dari calon – calon yang diajukan Menteri Keuangan selaku pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

2. Bank milik Swasta

a. Bank Swasta Nasional

Artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia. Bentuk hukum bank ini adalah Perseroan Terbatas. Bank ini dapat menjadi bank Devisa apabila memenuhi persyaratan antara lain tergolong sehat, memiliki modal yang cukup, kemampuan mengumpulkan dana dari pihak ketiga, memiliki tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman terhadap Valuta Asing.

b. Bank Swasta asing

Artinya modal bank tersebut dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagai cabang, capem, dan perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri. Bank asing yang dapat membuka kantor cabang pembantunya hanya bank asing yang telah ada dan tergolong sehat permodalannya. Bank Indonesia akan memberikan izin kepada bank asing yang akan membuka kantor cabangnya, dengan memperhatikan tingkat kesehatan bank, persaingan yang sehat antar bank, dan tingkat jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu. Selain itu, bank asing juga diperkenankan untuk menyelenggarakan tabungan sesuai prosedur yang berlaku.

c. Bank Campuran

Yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan satu atau lebih dari satu bank yang berkedudukan diluar negri. Pendirian dan kepemilikan bank campuran dilandasi atas asas kemitraan oleh pihak asing dan pihak nasional. Sasaran yang hendak dicapai adalah untuk peningkatan ekspor non migas. Kegiatan usaha bank campuran umumnya melakukan kegiatan yang hanya melayani nasabah – nasabah yang relatif besar saja. Umumnya para nasabah telah memiliki hubungan bisnis dengan bank partner asing dinegara asal atau dinegara asing lain.

3. Dilihat dari segi operasional

Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya maka bank dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu :

1. Bank Devisa

Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing, misalnya jual beli, menerima simpanan valuta asing serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran luar negri.

2. Bank non Devisa

Artinya bank yang tidak dapat melakukan usaha dibidang transaksi valuta asing.

2.4 Sumber Dana Perbankan

Dana Bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan Bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa – apa, artinya bank tidak berfungsi sama sekali. Sehingga dalam usaha untuk menghimpun dana tentunya bank harus mengenal sumber – sumber dana yang terdapat dalam lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana – dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari :

a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Dana yang bersumber dari bank berbentuk modal setor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham

b. Dana yang berasal dari lembaga keuangan.

Dana ini bisa berbentuk bank maupun non bank yang pada umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman

c. Dana yang berasal dari masyarakat luas berbentuk simpanan yang disebut giro, deposito dan tabungan

2.4.1 Dana dari Modal Sendiri (Dana Pihak Pertama)

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank yakni pemilik bank.

Dana itu sendiri terdiri dari beberapa bagian (pos) yaitu :

- a. *Modal yang disetor*, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Umumnya modal setoran pertama dari para pemegang saham ini sebagian dipergunakan bank untuk sarana perkantoran, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.
- b. Cadangan – cadangan, yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko dikemudian hari.
- c. Laba yang ditahan atau *Retained Earnings* yang semestinya milik para pemegang saham, tetapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja. Biasanya laba yang ditahan ini digunakan untuk memperkuat posisi *Cash Reserve* untuk penambahan *Loanable Funds*.

2.4.2 Dana yang Berasal Dari Lembaga Keuangan Lainnya (Dana Pihak Kedua)

Dana dari pihak kedua ini yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana (Uang) pada bank terdiri dari tiga pihak, yaitu :

- a. *Pinjaman dari Bank – bank* lain yang dikenal dengan *Call Money* yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada

- kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *Call Money* ini biasanya tidak terlalu lama yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Kadang kala ada yang meminjam hanya satu malam sehingga sering disebut *overnight call money*.
- b. *Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lain diluar Negri*, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah – panjang. Realisasi pinjaman ini (dari Bank Internasional atau Lembaga – lembaga keuangan Internasional) harus melalui persetujuan Bank Indonesia dimana secara tidak langsung Bank Indonesia selaku Bank Sentral ikut mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga solvabilitas bank bersangkutan.
- c. *Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank*, pinjaman dari LKBB ini kadang kala tidak benar – benar berbentuk pinjaman atau kredit tetapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual belikan sebelum jatuh tempo. Misalnya berbentuk *sertifikat bank* dengan jangka waktu melebihi 3 bulan dan dapat diperpanjang kembali tanpa mengeluarkan sertifikat baru. Dalam banyak hal, pinjaman seperti ini dapat digolongkan pada sumber dana dari pihak ketiga yaitu dari masyarakat.

2.4.3 Dana Dari Masyarakat (Dana Pihak Ketiga)

Dana masyarakat yang disimpan dalam Bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan bank dan terdiri dari 3 jenis :

- a. *Giro*, merupakan simpanan pihak ketiga (atas nama perorangan atau perusahaan berbadan hukum) kepada bank yang dipercayakan untuk dibukukan dalam *rekening koran*. Penarikan simpanan rekening koran dilakukan dengan menggunakan alat (instrumen) yang disebut cek, surat giro bilyet atau perintah tertulis kepada bank untuk dipindah bukukan.
- b. *Deposito Berjangka*, sebagai simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut perjanjian antara deposan (nasabah) dan bank yang bersangkutan, deposito lazimnya berjangka 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan.
- c. *Tabungan*, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat diambil sewaktu – waktu. Oleh karena itu bank tidak bisa mengetahui bila dana itu ditarik oleh nasabahnya.

2.5 Strategi Pemasaran Perbankan

2.5.1 Pengertian pemasaran

Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dari individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

R. Erich Reidenbach mendefinisikan pemasaran adalah sebagai suatu kegiatan bisnis terpadu yang diarahkan pada upaya mengidentifikasi, menciptakan, dan melayani permintaan.

Arti pemasaran menurut William j.Stanton adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromisikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan kepada pembeli.

2.5.2 Konsep Pemasaran

Konsep pemasaran yaitu bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran.

Konsep pemasaran mengambil perspektif dari luar kedalam, dimulai dengan pendefinisian pasar, memfokuskan pada kebutuhan pelanggan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang akan mempengaruhi pelanggan, dan menghasilkan keuntungan melalui penciptaan kepuasan konsumen. Konsep pemasaran yang sebenarnya adalah memfokuskan pada pasar, berorientasi pada pelanggan, usaha pemasaran yang terkoordinir yang ditujukan untuk menghasilkan kepuasan pelanggan sebagai kunci untuk mencapai tujuan organisasi.

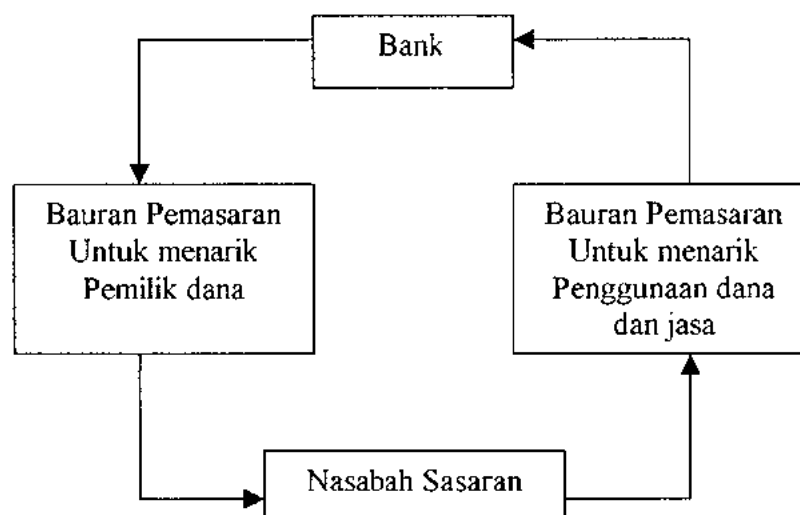
Untuk mencapai hasil tersebut setiap lembaga harus memperhatikan konsep pemasaran yang menyatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri atas penentuan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan.

2.5.3 Konsep Pemasaran Perbankan

Sebagaimana dalam penjualan jasa, aktivitas pemasaran dalam industri perbankan memfokuskan pada konsumen atau nasabah itu sendiri. Pemasar menjadi orang yang melayani dan berusaha mengetahui jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen atau nasabah.

Dalam aktivitas pemasaran jasa bank, terdapat dua kegiatan yang dilakukan secara bersama (*dual marketing task*), yaitu kegiatan pemasaran untuk menghimpun dana (dalam bentuk simpanan) dan kegiatan pemasaran untuk memasarkan dana (dalam bentuk pinjaman atau kredit) serta jasa – jasa perbankan lainnya. Menurut Suranto (1995), strategi pemasaran dan bauran pemasaran bank (*marketing mix*) secara sistematis dapat dicermati dari gambar berikut :

Gambar 2.5
Dual task Pemasaran Perbankan



Sumber : Suranto, 1995, Call : *Sarana utama pemasaran jasa bank, Artikel dalam majalah bank dan manajemen, Januari/Februari 1995, Jakarta*

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa dana merupakan sasaran utama dalam pemasaran jasa bank. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya sebagian besar liabilitas bank dibiayai oleh pihak ketiga, sedangkan asset sebagian besar berupa pinjaman kepada debitur.

Philip Kotler (1997) mengemukakan bahwa dalam industri perbankan, pengertian pemasaran bank adalah sebagai berikut :

1. Pemasaran adalah iklan, promosi penjualan, dan publikasi, dengan tujuan menarik nasabah baru dan memperkenalkan produk jasa bank.
2. Pemasaran adalah menciptakan suasana yang menyenangkan dan bersahabat. Bankir serta seluruh pihak di bank dituntut untuk bersikap ramah terutama pada bagian yang berhadapan langsung dengan nasabah.
3. Pemasaran adalah segmentasi dan inovasi, dimana dalam bersaing baik dituntut untuk dapat mengantisipasi segala kebutuhan nasabahnya dengan melakukan segmentasi pasar serta memperkenalkan produk – produk baru.
4. Pemasaran adalah penentuan posisi, dimana bank dituntut untuk memiliki ketidaksamaan dengan bank – bank lainnya. Posisi pada dasarnya membantu mengetahui perbedaan suatu bank dari bank – bank pesaing.

Menurut Berry (1990) bahwa jasa perbankan berupa pelayanan (service) sehingga diperlukan strategi pemasaran yang menggunakan konsep 4 P (*Product, Price, Place, and Promotion*) dan 2 C (*Customer sensitivity and Customer confidence*) dan S (*Service*). Untuk lebih jelasnya, konsep 4P, 2C , S adalah sebagai berikut :

1. *Product*, yaitu mutu, keandalan, dan atribut – atribut produk.
2. *Price*, yaitu harga yang ditetapkan, syarat – syarat pembayaran, dan kemudahan – kemudahan lainnya.
3. *Place*, yaitu aksesabilitas produsen, fasilitas yang dimiliki produsen, syarat pembayaran, dan ketersediaan bagi nasabah.
4. *Promotion*, yaitu periklanan, publisitas dan potongan harga.
5. Kepekaan pelanggan (*Customer sensitivity*), yaitu sikap karyawan, perlakuan terhadap nasabah dan tanggapan terhadap nasabah.
6. Kemudahan dan kenyamanan nasabah (*Customer confidence*), yaitu kesediaan nasabah, kenyamanan nasabah, dan penjualan.
7. Layanan atau jasa (*service*), yaitu pelayanan yang baik terhadap nasabah, dan kenyamanan nasabah.

2.6 Deposito Berjangka

Deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

Pengertian deposito berjangka seperti dalam pengertian diatas apabila waktu yang ditentukan telah habis maka deposan bisa menarik deposito berjangka atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito berjangka.

Tingkat suku bunga deposito yang diberikan sangat menarik sesuai dengan perkembangan pasar, dan bunga dibayarkan setiap bulan sesuai dengan tanggal dimana deposito dikeluarkan atas nama pembelinya. Kalau dilihat dari sudut pandang akuntansi maka simpanan berjangka dicatat dalam proses akuntansi bank yang dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu yang akan jatuh pada tahun depan atau paling tidak setahun yang akan datang dan deposito akan jatuh tempo lebih dari setahun.

Penggolongan simpanan berjangka yang kurang dari setahun disebut sebagai simpanan berjangka pendek dan harus digolongkan kedalam kelompok hutang lancar suatu bank. Sedangkan yang akan jatuh tempo lebih dari setahun disebut dengan simpanan jangka panjang.

Tanpa adanya penggolongan jatuh tempo yang benar, suatu bank akan menghadapi kesulitan dalam mengelola kewajiban yang harus dipenuhi.

Tujuan dari penggolongan dan penyajian dalam bentuk laporan keuangan pada neraca adalah untuk penyajian secara wajar posisi hutang jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan ini sangat diperlukan oleh suatu bank dalam rangka pertanggung jawaban manajemen kekayaan yang berguna untuk menyajikan informasi mengenai jatuh tempo simpanan berjangka sebagai dasar untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi oleh suatu bank.

2.7 Peranan Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu. Dalam masyarakat tradisional tabungan yang dicipta terutama digunakan untuk menyediakan pinjaman kepada anggota masyarakat lain yang lebih miskin atau ditanamkan dalam kegiatan yang tidak produktif seperti membeli tanah, bangunan, rumah dan sebagainya. (Sadono Sukirno:1993:353)

Tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga, makin tinggi tingkat bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan pengeluarannya untuk konsumsi guna menambah tabungan. (Nopirin:1992:7)

Rumah tangga menyimpan sebagian pendapatannya sebagai tabungan (S), untuk mempertahankan dalam perekonomian, tabungan rumah tangga ini melalui pasar modal dan sektor perbankan disalurkan ke sektor perusahaan yang oleh perusahaan digunakan untuk membiayai pengeluaran investasi (I).

Dalam perekonomian seperti ini berarti pendapatan rumah tangga digunakan untuk pengeluaran konsumsi (C) dan pengeluaran dari sector perusahaan berupa pengeluaran investasi perusahaan (I).

Perekonomian akan berbeda dalam keadaan keseimbangan, apabila pendapatan sama dengan pengeluaran. Karena dalam perekonomian terdapat dua macam pengeluaran yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) dan pengeluaran investasi perusahaan (I). Maka secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut :(Endang Sih Prapti:1996:20)

$$E = C + I$$

Dan persamaan pendapatan menjadi :

$$Y = C + S$$

Keseimbangan terjadi apabila :

$$E = Y$$

Karena $E = C + I$, maka persamaan keseimbangan dapat ditulis :

$$Y = C + I, \text{ maka } C + S = C + I$$

$S = I$, artinya kegiatan menabung sama dengan kegiatan investasi

Dengan kata lain, perekonomian dua sector akan berbeda dalam keseimbangan apabila tabungan sama dengan investasi. Dalam teori ekonomi tabungan rumah tangga disebut kebocoran sedangkan pengeluaran investasi perusahaan disebut suntikan.

Dengan menggunakan persamaan aljabar fungsi tabungan dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = C + S$$

$$S = Y - C, \text{ karena } C = C_0 + bY$$

$$S = Y - (C_0 + bY)$$

$$= Y - C_0 - bY$$

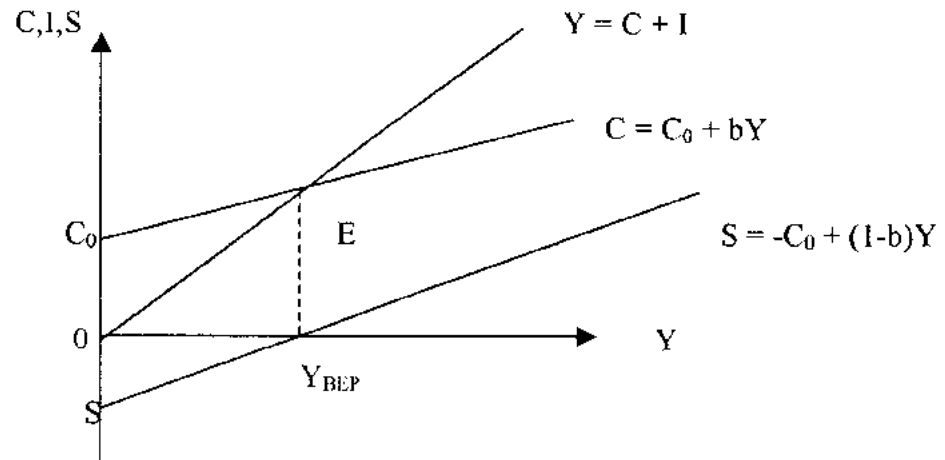
$$= -C_0 + (1 - b)Y$$

Jadi fungsi tabungan :

$$S = -C_0 + (1 - b)Y$$

Dimana $(1 - b)$ adalah besarnya hasrat marginal untuk menabung atau (MPS). Dengan demikian besarnya MPS dapat ditulis : $MPS = 1 - MPC$

Kurva pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kurva tabungan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Titik E menunjukkan besarnya pendapatan yang hanya dapat menutupi pengeluaran konsumsi saja (Pendapatan BEP), hal ini dapat terlihat bahwa pendapatan (Y) sama dengan (C). Pada titik E tersebut kurva tabungan memotong sumbu pendapatan sebesar Y_{BEP} .

Pendapatan rumah tangga (Y) dialokasikan untuk konsumsi rumah tangga (C) dan tabungan (S) atau secara sistematis ditulis $Y = C + S$. apa bila $C = Y$ dimasukkan pada persamaan diatas diperoleh $Y = Y + S$ atau $Y - Y = S$, sehingga $S = 0$ ini berarti pada tingkat pendapatn BEP maka tabungan (S) = 0.

2.8 Pandangan Klasik dan Keynes tentang Tabungan

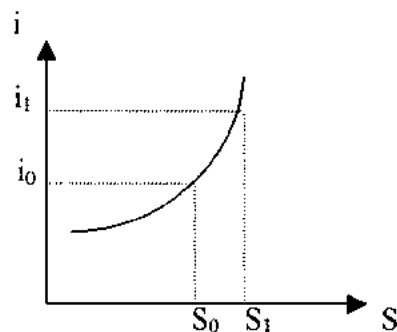
2.8.1 Pandangan klasik

Dalam analisa ekonomi, ada 2 pandangan yang berbeda tentang faktor penting yang menentukan jumlah tabungan dalam masyarakat

Golongan Klasik berpendapat bahwa jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh tingkat bunga, semakin tinggi

tingkat bunga, semakin besar jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat.

Jadi menurut klasik, tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga atau $S = f(i)$. Dibawah ini terdapat gambar pandangan klasik mengenai penentu tabungan yaitu :



Gambar diatas menunjukkan apabila tingkat bunga i_0 maka jumlah tabungan ada sebesar S_0 dan apabila tingkat i_1 jumlah tabungan adalah S_1 . dengan demikian gambar menunjukkan pandangan klasik yang menyatakan makin tinggi tingkat bunga maka banyak tabungan yang akan dilakukan masyarakat. (Sadono Sukirno:1994:77)

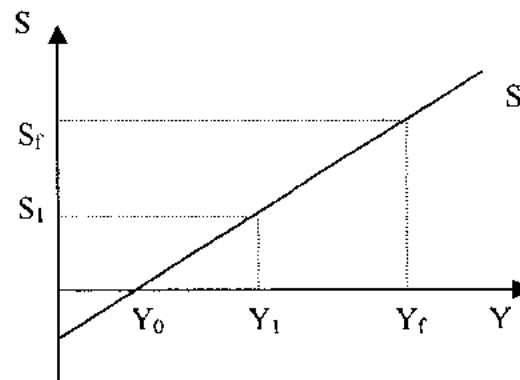
Tingkat bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Seseorang akan membuat lebih banyak tabungan apabila tingkat bunga tinggi, karena lebih banyak bunga yang akan diperoleh. Pada tingkat bunga rendah orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan belanja atau konsumsi daripada menabung. Dengan

demikian pada tingkat bunga yang rendah masyarakat cenderung menambah pengeluaran konsumsinya.

2.8.2 Pandangan Keynes

Golongan Keynes berpendapat bahwa besarnya tabungan yang dilakukan oleh seseorang bukan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat bunga tetapi besar kecilnya tabungan tergantung pada besar kecilnya pendapatan seseorang. Semakin besar jumlah pendapatan seseorang makin besar pula jumlah tabungan yang dilakukan oleh seseorang. Apabila jumlah pendapatan seseorang tidak mengalami kenaikan atau penurunan, perubahan yang cukup besar dalam tingkat bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti atas jumlah tabungan yang dilakukan oleh seseorang.

Pandangan Keynes mengenai penentuan tabungan :



Gambar diatas menerangkan pandangan Keynes mengenai penentuan tabungan masarakat. Garis S adalah fungsi tabungan yaitu suatu garis yang menghubungkan hubungan antara jumlah tabungan dengan pendapatan nasional. Garis S bermula dari nilai tabungan

bermula dari nilai tabungan negatif dan S berbentuk naik dari kiri bawah kekanan atas. Bentuk garis S tersebut menggambarkan sifat tabungan masyarakat sebagai berikut : (Sadono Sukirno:1994:77-78)

1. Apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat rendah. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan dimasa lalu untuk membiayai kehidupannya. Baru pendapatan nasional melebihi Y_0 masyarakat menabung sebagian dari pendapatannya.
2. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak tabungan masyarakat. Apabila pendapatan nasional adalah Y_1 tabungan adalah S_1 dan apabila pendapatan nasional adalah Y_f , jumlah tabungan adalah S_f .

2.9 Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi jumlah Deposito

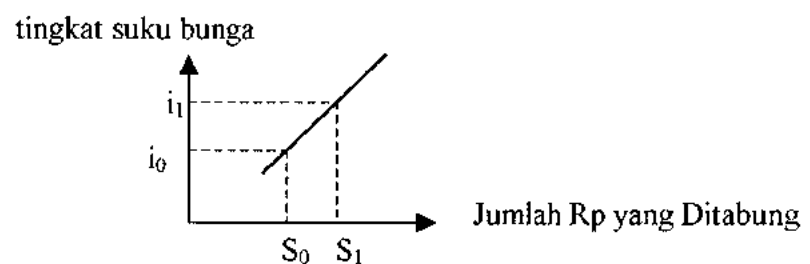
2.9.1 Pengaruh PDB per kapita terhadap deposito

Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin meningkat pula simpanan seseorang. dengan asumsi dari pendapatan yang telah dikeluarkan untuk konsumsi, dan sisanya mereka simpan di bank. Disini dapat kita lihat ada hubungan yang positif, semakin tinggi pendapatan masyarakat semakin tinggi pula simpanan mereka di bank.

2.9.2 Pengaruh tingkat suku bunga nominal terhadap deposito

Menurut teori klasik bahwa makin tinggi suku bunga akan menyebabkan makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat

beranggapan akan mendapatkan tambahan pendapatan dari tingkat bunga, dengan asumsi minat masyarakat menabung semakin meningkat dengan mengorbankan pengeluaran untuk konsumsi akibat ingin menambah tabungannya. Hubungan antara tingkat suku bunga dengan tabungan adalah positif, yang dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Perubahan suku bunga dari i_0 ke i_1 akan mempengaruhi jumlah Rp yang akan ditabung sebesar S_0 ke S_1

2.9.3 Pengaruh jumlah penduduk terhadap deposito

Besar kecilnya jumlah penduduk sangat mempengaruhi volume tabungan pada bank. Asumsi ini digunakan semakin besar jumlah penduduk suatu daerah semakin besar pula produk simpanan ditawarkan, sehingga diharapkan bisa mempengaruhi jumlah deposito dengan meningkatnya para penabung (nasabah).

2.9.4 Pengaruh krisis moneter terhadap deposito

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan agustus ini sangat memberikan dampak yang berarti bagi dunia perbankan. Misalnya bank kesulitan dana sehingga banyak bank yang melakukan merger, dengan dijamin oleh pemerintah. Disini dapat kita lihat pengaruhnya

terhadap simpanan berjangka. Dengan adanya krisis moneter maka peluang bisnis berkurang sehingga masyarakat menyimpan dananya dalam bentuk deposito. Disini dapat kita lihat ada pengaruh positif dari dampak krisis ekonomi terhadap tabungan.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK PEMERINTAH

3.1 Sejarah Berdirinya bank Pemerintah

Setelah perang dunia kedua, selama masa perjuangan kemerdekaan, didaerah republik muncul 2 bank, yaitu Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Bank Negara Indonesia didirikan dengan maksud menyediakan fasilitas – fasilitas sebagai bank umum. Disamping bertindak sebagai bank sentral dari republik. Bank Rakyat Indonesia yang merupakan perubahan dari Algemene Volkscrediet bank adalah bank pemerintah yang didirikan untuk menyediakan kredit pedesaan dan kredit – kredit kecil lainnya.

Pada tahun 1952 didirikan bank pemerintah ketiga yang diberi nama Bank Industri Negara, yang bertugas sebagai bank pembangunan industri. Pada tahun 1960 bank ini dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia. Pada tahun 1953 De Javasche Bank dinasionalisasikan dan namanya diganti menjadi Bank Indonesia dengan tugas sebagai Bank Sentral. Dalam tahun – tahun sebelum tahun 1960 didirikan pula beberapa bank pemerintah lainnya, yaitu Bank Tani dan Nelayan, Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Pos. Pada tahun 1960 Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tani dan Nelayan dilebur menjadi Bank Koperasi dan pada tahun 1963 Bank Tabungan Pos diubah menjadi Bank Tabungan Negara.

Dengan berlakunya Panpres No 17/1965 Maka dibentuklah “Bank Tunggal” Bank Indonesia yang merupakan pengintegrasian bank – bank pemerintah termasuk Bank Indonesia sendiri. Sehingga secara hukum terdapat tiga bank pemerintah, yaitu :

1. Bank Tunggal (Bank Indonesia)
2. Bank Dagang Negara
3. Bank Pembangunan Indonesia

Disamping Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang namanya diubah menjadi Bank Negara Indonesia Unit I, masih ada empat unit Bank Tunggal lainnya, yaitu :

1. Bank Negara Indonesia Unit II (dahulu Bank Koperasi, Tani dan Nelayan)
2. Bank Negara Indonesia Unit III (dahulu Bank Negara Indonesia)
3. Bank Negara Indonesia Unit IV (dahulu Bank Umum Negara)
4. Bank Negara Indonesia Unit V (dahulu Bank Tabungan Negara)

3.1.1 Bank – Bank Umum Pemerintah

Sesuai dengan skala Prioritas nasional, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam ketentuan MPRS No.XXIII/MPRS/1966, maka bank pemerintah ditentukan arah pemberian kreditnya termasuk penyediaan kredit untuk melayani kebutuhan masyarakat tani, nelayan dan industri kecil. Oleh karena itu disamping melakukan usaha sebagai bank umum, bank pemerintah harus memberi prioritas kepada pemberian kreditnya (secara teoritis) sebagai berikut :

1. Kredit Bank Negara Indonesia 1946 diprioritaskan ke sektor industri.
2. Kredit Bank Dagang Negara disektor pertambangan.
3. Kredit Bank Bumi Daya (pengganti Bank Umum Negara) disektor perkebunan dan kehutanan.
4. Kredit Bank Rakyat Indonesia disektor Koperasi, tani dan nelayan.
5. Kredit Bank Ekspor Impor Indonesia disektor produksi, pengolahan dan pemasaran bahan – bahan ekspor.

Pengutaman pemberian kredit dibeberapa sektor bersifat luwes dan berdasarkan pada kemampuan masing – masing bank. Pemberian kredit kesuatu sektor yang menjadi prioritas suatu bank dapat pula dilakukan oleh bank pemerintah lainnya.

3.1.2 Bank Pembangunan Pemerintah

Dengan Perpu No 21 tahun 1960 didirikanlah bank pembangunan Indonesia (Bapindo) dengan tugas utama membantu pemerintah membiayai usaha – usaha pembangunan nasional. Dengan didirikannya Bank Bapindo, maka Bank Industri Negara yang dibentuk pada tahun 1952 ditiadakan dan dimasukkan kedalam Bank Pembangunan Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/D/27/1966 tanggal 15 Februari 1966 Bapindo telah ditugaskan pula untuk bergerak dibidang bank umum untuk sektor pemerintah. Bapindo diperkenankan menerima simpanan giro, deposito dan memperluas

penggunaan pembayaran giral, serta memberikan kredit produksi untuk usaha – usaha disektor pemerintah.

3.1.3 Bank Tabungan Pemerintah

Dengan berlakunya Undang – undang No 20 tahun 1968 untuk Bank Tabungan Negara, maka bank Negara Indonesia Unit V yang sebelumnya tergabung dalam “Bank Tunggal” Bank Negara Indonesia, sejak tanggal 31 Desember 1968 menjadi Bank Tabungan Negara yang berdiri sendiri. Dalam Undang – undang No 20 ditetapkan pula bahwa tugas dan usaha Bank Tabungan Negara diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana – dana dari masyarakat terutama dalam bentuk tabungan.

3.2 Sejarah Bank – Bank Pemerintah

Bank Pemerintah disini adalah, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia 46, Bank Tabungan Negara, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor dan bank Pembangunan Indonesia. Pada tahun 1997 dan 1998 terjadi krisis keuangan di Indonesia maka Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor dan Bank Pembangunan Indonesia melakukan merger menjadi satu bank yang kini bernama Bank Mandiri.

3.2.1 Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara

Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

3.2.2 Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 46)

Bank ini didirikan pada tahun 1946 di Jakarta sebagai bank sirkulasi dan bank sentral Republik Indonesia selama perjuangan fisik melawan Belanda antara tahun 1946 – 1949. Tugas sebagai bank sentral terutama membiayai dan membayar kembali utang negara. Menarik uang pendudukan Jepang dari peredaran dan mengganti dengan (URI) Uang Republik Indonesia. Jenis uang ini diedarkan oleh Kementerian Keuangan dan bukan oleh BNI 46 sebagai bank sentral dan merupakan surat utang Pemerintah RI.

Disamping mengedarkan uang URI dan membiayai utang – utang negara BNI 46 juga bertindak sebagai bank umum yang memberi kredit kepada perusahaan – perusahaan industri dan para pedagang di daerah yang dikuasai Republik Indonesia serta membiayai delegasi – delegasi kita diluar negeri karena Jakarta diduduki oleh Belanda. BNI 46 dibuka kembali pada tahun 1949 dengan status baru. Dalam Konpres Meja

Bundar di Den Haag pada bulan November 1949, De Javasche Bank diberi hak monopoli mengedarkan uang kertas bank, sedang BNI memusatkan kegiatan pada perbaikan dan pembangunan ekonomi. Namun tugas, hak serta kewajiban BNI tidak ditentukan dalam konferensi tersebut. Setelah penyerahan kedaulatan ditahun 1949, BNI mulai memperluas kegiatan dan pernah ditunjuk sebagai bank pembangunan.

Dengan Undang – undang No 1 tahun 1961, secara tegas ditetapkan tugas dan usaha BNI, yakni membantu mamajukan kemakmuran rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dalam lapangan perdagangan pada umumnya dan lapangan ekspor dan impor khususnya. Sejak berlaku undang – undang tersebut usaha BNI sebagai bank umum berkembang dengan pesat, terutama sebagai bank devisa. BNI melebarkan sayap dengan mebuca kantor cabang disetiap ibukota poprinsi.

Tetapi pada tahun 1967 dikeluarkan undang – undang pokok perbankan No 14 yang menetapkan kembali bank – bank pemerintahseperti semula sebelum ada gagasan integrasi ke dalam bank tunggal tersebut. Akhirnya pada tahun 1968 keluar undang – undang yang lengkap mengatur tugas dan kewajiban bank sentral dan seluruh bank pemerintah. Dengan undang – undang No 17 tahun 1968 ditetapkanlah nama BNI menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dengan tugas dan usaha pokok yang diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional, dengan melakukan usaha sebagai

bank umum devisa yang mengutamakan sektor industri. Dalam melaksanakan tugas, disamping perusahaan yang harus bekerja atas dasar pertimbangan finansial guna menjamin kelangsungan hidup usahanya dengan sehat, bank harus pula berfungsi sebagai “agen of development (agen pembangunan) yang berkewajiban menunjang pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang pembangunan ekonomi.

3.2.3 Bank Tabungan Negara (BTN)

Tahun 1897 adalah tahun keramat bagi BTN, karena pada saat itu berdasarkan Koninklijk Besluit No. 27 di Hindia Belanda didirikan Postpaarbank yang berkedudukan di Batavia, yang kini dikenal dengan nama Jakarta

Tujuan pendirian Postspaarbank anantara lain adalah mendidik masyarakat agar gemar menabung dan sekaligus memperkenalkan lembaga perbankan kepada masyarakat.

Sampai dengan penghujung tahun 1931 peranan Postspaarbank dalam penghimpunan dana masyarakat terus meningkat. Sampai dengan tahun 1939, dana yang berhasil dihimpun berjumlah Rp. 54 juta. Pencapaian ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan pada masa itu.

Selain itu yang patut dicatat antara tahun 1928 sampai dengan tahun 1934 adalah dibukanya kantor-kantor cabang Postspaarbank di Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Medan.

Pada tahun 1934 juga dikenal sebagai “era mesin-mesin akuntansi” dan pengenalan sertifikat “current account”.

Ketika pada tahun 1940 Jerman menyerbu Netherland, terjadi pengambilan dana besar-besaran oleh para nasabah Postspaarbank. Hanya dalam beberapa hari sebanyak Rp. 11 juta dibayarkan kepada para nasabah. Hal ini tidak berlangsung lama.

Tahun 1941 kepercayaan nasabah timbul kembali, dan pada tahun yang sama berhasil dihimpun dana sebesar Rp. 58,8 juta.

Terjadilah satu masa yang dapat dinamakan Masa Antara, karena tidak dapat dimasukkan dalam sejarah Bank Tabungan Pos yaitu antara Maret 1942-1946. Karena tahun 1942 Jepang mengambil alih kekuasaan kolonial Belanda dan Postspaarbank dibekukan. Pemerintah Jepang mendirikan Tyokin Kyoku. Misi “gemar menabung” Tyokin Kyoku gagal, karena hal tersebut dirasakan sebagai paksaan oleh rakyat Indonesia. Dalam masa ini cabang Jogjakarta dibuka.

Pendudukan Jepang di Hindia Belanda tidak berlangsung lama. Bangsa Indonesia kemudian memproklamkan kemerdekaannya. “Tyokin Kyoku” diambil alih dan namanya diganti “Kantor Tabungan Pos (KTP)”, yang diprakarsai oleh Bapak Darmosoetanto, Direktur pertama Kantor Tabungan Pos

Kantor Tabungan Pos berperan besar dalam pengerjaan penukaran uang Jepang dengan “Oeang Republik Indonesia (ORI)”. Dalam masa itu Kantor Tabungan Pos tidak dapat bekerja dengan aman, karena aksi

Militer Belanda. Tanggal 19 Desember 1946 Kantor Tabungan Pos dan kantor-kantor cabangnya diduduki Belanda.

Bulan Juni 1949 Pemerintah RI membuka sekaligus mengganti “Kantor Tabungan Pos” menjadi “Bank Tabungan Pos RI”, dengan maksud untuk membereskan pekerjaan KTP yang telah berantakan. Kantor ini bekerja samapai akhir tahun 1949. Selanjutnya, pemerintah hanya mengakui Bank Tabungan pos RI sebagai lembaga tabungan yang kemudian tahun 1950 namanya diganti menjadi Bank Tabungan Pos.

Bank Tabungan Pos semula kegiatannya masuk dalam lingkungan Kementerian Perhubungan. Tetapi kemudian beralih di bawah koordinasi pengawasan Departemen Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Pendirian Bank Tabungan Pos ditetapkan berdasarkan UU No. 36 Tahun 1953 (dimuat dalam Lembaran Negara No. 86 Tahun 1953 tanggal 28 desember 1953). Dasar inilah yang mengilhami untuk ditetapkannya tanggal tersebut sebagai awal mula lahirnya Bank. Tabungan Negara (Peraturan Direksi No. 12/Dir/Bidir/0988 tanggal 14 September 1988).

Menjelang kejatuhan Orde Lama (tahun 1964), sempat dilakukan tindakan awal untuk menyatukan seluruh Bank-Bank Pemerintah yang ada pada waktu itu menjadi “Bank Tunggal” dengan nama Bank Negara Indonesia.

Di dalam masa peralihan sebelum diintegrasikan pada Bank-Bank Pemerintah yang ada (kecuali Bank Dagang Negara) masing-masing

dijadikan “Unit” dari Bank Tunggal ini dan BTN merupakan Unit V dari Bank Negara Indonesia.

Sebagai “Unit”, BTN pada waktu itu sempat kehilangan kekuasaan dan wewenang, karena BTN langsung ditempatkan di bawah kekuasaan urusan Bank Sentral pada saat itu sedangkan BTN hanya dipimpin oleh seorang “Direktur Koordinator”.

Dengan tumbanganya Orde Lama, dan berkuasanya Orde Baru, Maka prakarsa pembentukan Bank Tunggal dikembalikan sebagaimana sebelumnya dan diatur kembali secara lebih sehat.

Setelah Orde Baru berhasil mengatur kembali kehidupan perekonomian yang mendapat perhatian utama, maka didahului lahirnya UU Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 ditetapkan UU No. 20 tahun 1968 mengenai pendirian Bank Tabungan Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut, maka tugas pokok BTN adalah diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana-dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk tabungan.

Pada tahun 1974 Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah. Untuk menunjang berhasilnya kebijakan tersebut, BTN ditunjuk sebagai wadah pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pada tahun 1976 ditandai sejarah realisasi KPR pertama kali di Semarang yang kemudian berlanjut dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya pada tahun 1982/1983.

Guna membiayai KPR tersebut, BTN harus mampu mengerahkan dana masyarakat. Untuk itu diversifikasi produk yang bersifat "Operasi Passiva" harus dilaksanakan. Sejak tahun 1976 pertumbuhan aset BTN meningkat tajam dari Rp. 11 Milyar pada akhir 1976 menjadi Rp. 3,7 Trilyun pada akhir tahun 1991.

Sejak resmi berdiri tahun 1953 sampai sekarang, telah lebih dari 38 tahun BTN menggeluti bidangnya. Jaringan operasionalnya tersebar luas di seluruh Indonesia. BTN telah mantap menyongsong pembangunan nasional tahun 2000. Baik di bidang perbankan khususnya, maupun pembiayaan perumahan. BTN juga telah mencanangkan tiga sasaran pokok dan memasyarakatkan budaya kerja yang disebut Panca Tertib. Era baru BTN juga ditandai dengan pengenalan logo baru.

Memasuki tahun 1992 terjadi perubahan mendasar dalam bentuk hukum Bank Tabungan Negara. Sebagai rentetan dari diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bentuk hukum Bank Tabungan Negara berubah menjadi Perusahaan Perseroan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Pendirian PT Bank Tabungan Negara didasarkan pada Akte Pendirian No. 136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani

Salim, S.H. Notaris di Jakarta. Perubahan bentuk ini menjadikan gerak PT Bank Tabungan Negara (Persero) lebih leluasa. Kalau sebelumnya lebih ditekankan sebagai bank tabungan dan sebagai lembaga pembiayaan perumahan, maka sejak 1 Agustus 1992 bidang kegiatannya diperluas menjadi bank umum.

Pada tahun 1994 melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dapat beroperasi sebagai Bank Devisa.

Dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 yang meluluhlantakkan ekonomi Indonesia telah membuat manajemen BTN untuk memutar kembali haluan bisnisnya. BTN kembali pada khitahnya, yaitu dengan bisnis pembiayaan perumahan. Keputusan ini pada akhirnya membantu sukses Bank BTN dalam proses rekapitalisasi.

Dengan rekapitalisasi ini manajemen BTN menetapkan paradigma baru sebagai bank yang terkemuka dan menguntungkan dalam pembiayaan perumahan. BTN telah menunjukkan kemampuannya dalam memberikan kontribusi pembiayaan perumahan meskipun pemerintah berada dalam kemampuan yang terbatas.

Untuk terus mendukung program pemerintah di bidang perumahan sekaligus dalam rangka memperkuat struktur pendanaan Bank BTN, pemerintah melalui Menteri BUMN dengan suratnya No. S-554/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 telah memutuskan Bank BTN sebagai bank umum dengan fokus pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

Kini Bank BTN telah bertekad untuk menjadi bank komersial dengan bisnis utama pembiayaan perumahan dan industri ikutannya. BTN juga telah menetapkan sasaran bisnisnya sebagai Bank Keluarga Indonesia, yang melayani kebutuhan seluruh keluarga Indonesia, dari rumah untuk semua kebutuhan.

3.2.4 Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dari segi aset, pinjaman dan deposito. Total aset bank ini per 31 Maret 2002 sebesar Rp 261,9 triliun, atau sekitar 24% dari total aset perbankan di Indonesia. Tercatat sebagai bank dengan keuntungan terbesar, Rp1,17 triliun per Maret 2002 (naik 270% pada periode yang sama tahun sebelumnya), Bank Mandiri juga merupakan bank dengan kapitalisasi terbesar di Asia dengan CAR (rasio kecukupan modal) lebih dari 27%. Angka yang beberapa kali lebih besar dari 8% yang ditetapkan oleh Bank of International Settlements (BIS).

Dengan 17.500 lebih karyawan, Bank Mandiri mampu menawarkan jasa keuangan yang komprehensif kepada 6 juta lebih nasabah korporasi dan individu serta perusahaan kecil dan menengah di Indonesia.

Bank Mandiri berdiri pada Oktober 1998, tak lama setelah krisis keuangan Asia 1997 dan 1998. Bank ini merupakan hasil merger empat bank pemerintah: Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor dan Bank Pembangunan Indonesia. Di masa krisis tersebut

pemerintah turun tangan. Hasilnya 67 bank ditutup, dimerger atau diakuisisi oleh lembaga keuangan lain. Untuk menyelamatkan posisi keuangan perbankan nasional dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pemerintah menerapkan program restrukturisasi radikal dan rekapitalisasi perbankan nasional. Program ini dijalankan oleh BPPN (Badan Penyelamat Perbankan Nasional). Prioritas pemerintah adalah mengurangi timpang tindih di sektor perbankan dan menciptakan sebuah bank yang jauh lebih besar dan tangguh, yang mampu memenuhi tuntutan perekonomian moderen.

Sejak berdiri Bank Mandiri telah berhasil membenahi neraca, tingkat keuntungan dan caranya berbisnis, sehingga ia kini menjadi bank yang paling disukai di Indonesia. Non-performing loans (NPL's) berhasil ditekan dari 71,29% pada penghujung 1999 menjadi 9,5% pada 31 Maret 2002. NPL's direstrukturisasi sesuai 19 langkah proses restrukturisasi. Sebagai catatan, proses restrukturisasi yang dialami Bank Mandiri termasuk yang paling ketat di kalangan perbankan Indonesia. Menyusul merger, Bank Mandiri menutup 194 cabang dan mengurangi karyawannya dari 26.600 orang menjadi 17.620 orang. Hasilnya, bangun organisasi menjadi ramping dan biaya operasi mengecil. Rasio antara biaya dengan pendapatan naik dari 33,8% pada 31 Maret 2001, menjadi 29,3% pada 31 Maret 2002.

Salah satu pencapaian terbesar Bank Mandiri adalah merampungkan renovasi kerangka dasar (platform) teknologinya.

Perusahaan mewarisi 90 kerangka dasar teknologi yang berbeda dari empat bank asalnya. Setelah 38.000 jam lebih jam kerja dan membelanjakan US\$ 23 juta untuk piranti baru, Bank Mandiri kini memiliki kerangka teknologi terpadu yang menghadirkan interface untuk nasabah. Dengan demikian proses kerja di balik meja para nasabah akan lebih efisien. Pembinaan kerangka teknologi yang seluruhnya butuh waktu tiga tahun dan berbiaya US\$ 200 juta kini sudah separuh jalan. Kalau proses ini rampung maka produk dan jasa bank ini akan semakin meningkat.

Nasabah Bank Mandiri yang berupa korporasi merupakan inti perekonomian Indonesia dan inti sektor ekspor. Ini mencakup nama-nama terkenal di dunia internasional seperti Garuda Indonesia, Semen Gresik dan Pertamina. Kalau dilihat per sektor, sebarannya merata khususnya di bidang pertambangan, bisnis eceran, semen, listrik, minyak dan gas serta penerbangan. Proses penyetujuan kredit (credit approvals) dan monitoring sangat ditentukan oleh proses persetujuan "empat mata". Proses yang membedakan keputusan kredit dari keputusan marketing. Bank ini telah mencatatkan kemajuan penting dalam menumbuhkan nasabah berupa perusahaan kecil dan menengah. Pada 31 Maret 2002 pinjaman untuk nasabah eceran (termasuk perusahaan menengah) mencapai US\$ 9,25 triliun, meningkat 16,8% dari periode yang sama tahun 2001.

Bank Mandiri juga mencatatkan kemajuan penting di segmen eceran. Total deposito di segmen ini mencapai Rp 187,6 triliun pada 31 Maret 2002, atau naik 5,8% dibanding pada 31 Maret 2001. Unit kartu kredit Bank Mandiri menjaring lebih dari 100.000 nasabah baru dalam sepuluh bulan pertamanya. Saat ini bank ini memiliki 642 cabang. Distribusi bank ini meningkat lewat 1.184 ATM baru yang dimilikinya, yang merupakan bagian dari 3.000 jaringan plus LINK (jaringan dengan seluruh ATM bank pemerintah).

Sejak berdiri Bank Mandiri telah berupaya menciptakan tim manajemen yang tangguh dan profesional yang beroperasi dengan prinsip internasional standar: governance, control and compliance. Bank ini diawasi oleh Dewan Komisaris yang diangkat oleh Departemen Keuangan. Para komisaris ini adalah anggota terhormat dari masyarakat keuangan. Jajaran tertinggi dari manajemen eksekutif adalah Dewan Direktur, yang dipimpin oleh Presiden Direktur. Dewan Direktur termasuk para bankir yang ditarik dari ke keempat bank asal serta direktur dari luar. Kendati hukum di Indonesia mensyaratkan direktur harus berkebangsaan Indonesia, Bank Mandiri telah merekrut sejumlah bankir bukan berkebangsaan Indonesia guna menduduki posisi-posisi kunci, termasuk posisi Kepala Bagian Keuangan. Sebagai tambahan, Bank Mandiri mempertahankan independensinya di bidang Offices of Compliances, Audit dan Sekretariat Perusahaan. Satu hal lagi, juga di

bawah pengawasan auditor luar (dari bank Indonesia), Badan Pemeriksa Keuangan dan perusahaan audit internasional.

3.3 Perkembangan Bank Pemerintah

Struktur persaingan dalam perbankan kita pernah digolongkan sangat tidak sehat. Karena terdapat unsure diskriminatif, monomoplistik, protektif terhadap bank tertentu sehingga menimbulkan kurangnya profesionalisme. Berbagai fasilitas, prioritas, proteksi dan pembatasan yang diberikan kepada bank pemerintah telah membuat bank pemerintah kaku dan lamban, birokratis, rasio personal yang tidak efektif dan pernah sangat tergantung kepada Bank Indonesia, mengakibatkan bank pemerintah tidak mandiri.

Beberapa kebijaksanaan telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya adalah dalam sector perbankan. Keperluan akan adanya sistem perbankan yang efisien semakin mendesak untuk dapat mewujudkan berbagai sasaran yang ingin dicapai dalam keadaan sumber dana yang semakin terbatas.

Kebijaksanaan 1 Juni 1983 menghapus penetapan suku bunga dan sistem pagu kredit. Bank pemerintah mulai melangkah kearah profesionalisme. Pada waktu itu untuk pertama kalinya dilakukan deregulasi perbankan yang memberikan landasan kebebasan bagi bank – bank pemerintah untuk menentukan sendiri beberapa kebijaksanaan usahanya.

Kebijaksanaan yang baru tadi diharapkan dapat menumbuhkan iklim yang sehat dan kepastian bagi dunia usaha serta masyarakat umum dalam pengarahannya sehingga dapat lebih berperan dalam pembangunan nasional.

Kebijaksanaan ini membawa hasil yang cukup menggembirakan meskipun membawa dampak kenaikan tingkat suku bunga deposito dan bentuk simpanan lain.

Sejak Pakjun 1983 itu, peran pasar semakin menonjol dalam mobilisasi dana dan alokasi perkreditan. Langkah dari Pakjun telah meletakkan dasar utama perbankan, namun secara lembaga, perbankan itu sendiri sulit berkembang. Izin pendirian bank dan kantor cabang tidaklah mudah, sehingga produk baru dan efisiensi sulit ditingkatkan, begitu juga dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan moneter serta pasar modal belum berkembang.

Dikeluarkannya kebijaksanaan deregulasi paket 27 Oktober 1988 dengan maksud mendorong perluasan jaringan keuangan dan perbankan seluruh Indonesia serta diversifikasi sarana pengerahan dana. Upaya itu antara lain berupa kemudahan dalam pendirian bank – bank swasta baru, pembukaan kantor cabang baru, pendirian Bank Perkreditan Rakyat, pemberian izin untuk menerbitkan sertifikat deposito bagi lembaga keuangan bukan bank, serta perluasan tabung bagi semua bank melalui diversifikasi sarana pengerahan dana.

Dengan adanya Pakjun 1983 dan Pakto 1988 menyebabkan posisi pengumpulan dana oleh bank pemerintah meningkat dan jumlah kantor cabang bank pemerintah juga semakin banyak.

Untuk mendukung kebijaksanaan sebelumnya yaitu meningkatnya pengumpulan dana dan meningkatnya jumlah perbankan yang akan meningkatkan pula pemberian kredit perbankan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijaksanaan perkreditan perbankan yaitu paket 29 Januari 1990 (Pakjan 90) untuk kepentingan pengusaha kecil dengan dukungan likuiditas Bank Indonesia

Kebijaksanaan perkreditan perbankan diarahkan untuk mencapai sasaran pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas secara serasi dan seimbang. Dalam upaya mencapai sasaran pemerataan pembangunan kebijaksanaan perkreditan diarahkan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan berusaha para pengusaha golongan ekonomi lemah dengan mengusahakan penyediaan kredit dengan jumlah yang memadai, tingkat bunga yang wajar dan prosedur yang sederhana. Disamping itu kebijaksanaan perkreditan juga diarahkan pada sektor – sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja yang berarti. Agar mendapat mamfaat yang lebih besar, maka penyaluran kredit akan makin diperluas kedaerah – daerah, termasuk daerah pedesaan.

Kegiatan pemberian kredit pada bank pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pemberian kredit masih ditetapkan oleh Bank Indonesia. Alokasi pemberian kredit diprioritaskan untuk program bantuan kredit untuk meningkatkan usaha para pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah.

Deregulasi demi deregulasi semakin menyehatkan perbankan di Indonesia. Kemudian diharapkan agar bank pemerintah secara khusus dan perbankan di Indonesia secara luas memiliki sikap tanggap terhadap perkembangan Pembangunan Nasional, sehingga peranannya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam analisis ialah data yang didapat dari buku laporan dan studi kepustakaan atau data sekunder, antara lain data statistik dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan laporan Badan Pusat Statistik, Yogyakarta. Metode pencarian dan pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan angka – angka dan data – data sekunder dari berbagai bentuk laporan dan studi kepustakaan.

4.2. Diskripsi Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen antara lain adalah), PDB per kapita (X1), Suku bunga nominal (X2), jumlah penduduk (X3) dummy variabel (D). Sedangkan variabel dependennya adalah deposito (Y). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

Proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer dalam paket E-Views sedangkan operasi regresinya menggunakan Ordineary Least Square (OLS). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi non linier, dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{LogY} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogX1} + \beta_2 \text{LogX2} + \beta_3 \text{LogX3} + \beta_4 D$$

Keterangan :

LogY = Deposito berjangka 3 bulan (Milyar/Rp)

LogX1 = PDB per kapita (Rupiah)

LogX2 = Suku bunga nominal (%)

LogX3 = Jumlah penduduk (Ribu orang)

D = Dummy Variabel :

0 = Sebelum krisis moneter

1 = Setelah krisis moneter

β_0, \dots, β_n = Koefisien regresi masing-masing variabel

4.2.1. Hasil Analisis Regresi Dengan OLS

Analisa data linier dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh, PDB per kapita, suku bunga nominal, jumlah penduduk dan krisis moneter terhadap deposito. Hasil regresi yang diolah dengan program E-Views dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel4.1
Hasil Analisa Regresi

Variabel Independen	Koefisien Regresi	Standar Error	t – Hitung	Prob
C	-178.1112	21.88643	-8.137971	0.0000
LogX1	-5.082184	1.114457	-4.560232	0.0005
LogX2	0.015469	0.195763	0.079021	0.9382
LogX3	21.35648	2.976619	7.174746	0.0000
D	0.707640	0.237203	2.983272	0.0106
R-Squared	= 0.978828	Mean of dependent var	= 8.560741	
Adjusted R-Squared	= 0.972314	S.D. of dependent var	= 1.340720	
S.E. of Regression	= 0.223084	Akaike info criterion	= 0.067600	
Sum squared resid	= 0.646966	Schwarz criterion	= 0.314925	
Log likelihood	= 4.391602	F-statistik	= 150.2566	
Durbin-Watson stat	= 1.788166	Prob (F-statistic)	= 0.000000	

Dengan uji satu sisi (*one tailed test*)

$$\text{T-tabel dengan } \alpha = 5 \%$$

$$\text{T-tabel} = t_{\alpha} \text{ df}(n - k)$$

$$\text{T-tabel} = t_{0.05} \text{ df}(13)$$

$$= 2,160$$

$$\text{F-tabel dengan } \alpha = 5 \%$$

$$\text{F-tabel} = f_{\alpha ; k - 1 ; n - k}$$

$$\text{F-tabel} = f_{0.05 ; 4 ; 13}$$

$$= 3.18$$

Berdasarkan hasil tersebut diatas diperoleh persamaan regresi dengan menggunakan regresi linier adalah sebagai berikut :

$$\text{LogY} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogX1} + \beta_2 \text{LogX2} + \beta_3 \text{LogX3} + \beta \text{D}$$

$$\text{LogY} = -178.1112 - 5.082184 \log(\text{X1}) + 0.015469 \log(\text{X2}) + 21.35648 \log(\text{X3}) + 0.707640 (\text{D})$$

4.3. Pengujian Statistik

Pengujian statistik terdiri dari uji F-test untuk melihat tingkat signifikansi keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan uji t-test adalah untuk melihat tingkat signifikan nilai koefisien estimasi secara individu. Dan uji t-test pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Sedangkan

R-squared (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel independen dengan variabel dependen.

4.3.1. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serempak (F-Statistik)

Pengujian ini untuk menguji secara keseluruhan model regresi apakah memang terdapat hubungan antara variabel independen (PDB per kapita, suku bunga nominal, jumlah penduduk dan krisis moneter) secara bersama-sama dengan variabel dependen (deposito).

Hipotesis yang diajukan adalah :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: Dimana semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen).

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: Semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (semua variabel independen secara serempak berpengaruh terhadap variabel dependen).

Jika F-hitung $>$ F-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti variabel independen (PDB per kapita, suku bunga nominal, jumlah penduduk, dan krisis moneter) secara serentak mempengaruhi variabel dependen (deposito) dengan signifikan. Jika F-hitung $<$ F-tabel maka H_0 diterima dan

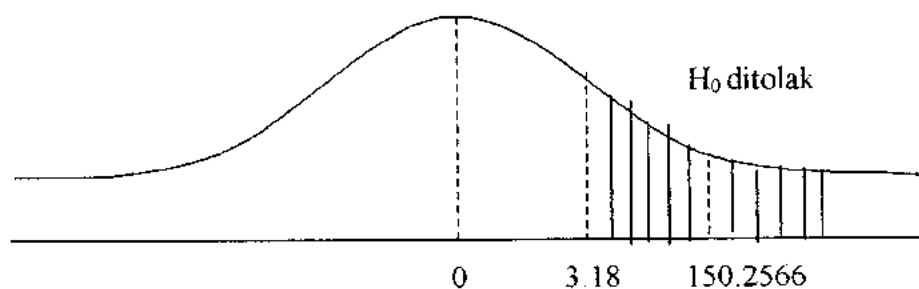
H_a ditolak hal ini berarti variabel independen (PBD per kapita, suku bunga nominal, jumlah penduduk dan krisis moneter) secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen (deposito) dengan signifikan.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh f-tabel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{F-Tabel} & : \alpha ; k - 1 ; n - k \\ & : 0.05 ; 4 ; 13 \\ & : 3.18 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2.1 maka diperoleh nilai F-hitung = 150.2566 dan dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ dan dk (4, 13) diperoleh F-tabel = 3.18, jadi F-hitung > F-tabel maka dapat diambil kesimpulan menolak H_0 dan menerima H_a , sehingga dapat dikatakan bahwa secara serempak variable independen (X_1, X_2, X_3, D) berpengaruh secara nyata terhadap deposito (Y).

Gambar 4.1
Uji F-Statistik



4.3.2. Pengujian Koefisien Regresi secara Individu (t-Statistik)

a. Pengujian Koefisien Regresi Terhadap PDB per kapita (X1)

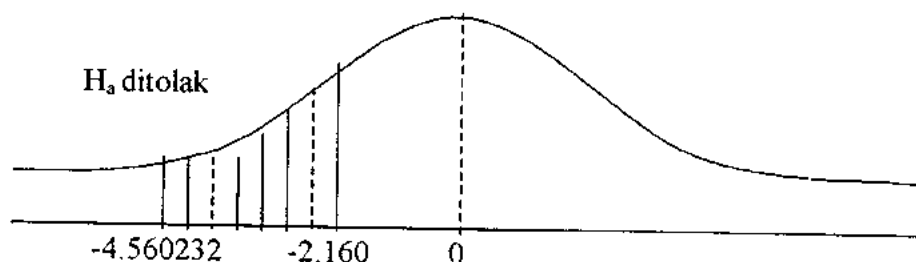
$H_0 : \beta_1 = 0$... Secara individu variabel PDB per kapita (X1) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito (Y).

$H_a : \beta_1 > 0$... Secara individu variabel PDB per kapita (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito (Y)

Jika t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel PDB per kapita (X1) tidak mempengaruhi jumlah deposito (Y) secara signifikan. Jika t-hitung > t-tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya adalah variabel PDB per kapita (X1) mempengaruhi jumlah deposito (Y) secara signifikan.

Tanda koefisien regresi PDB per kapita (X1) adalah sebesar -5.082164 dan dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar -4.560232 dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 2.160. Karena t-hitung (-4.560232) > t-tabel (2.160) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa PDB per kapita (X1) tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap jumlah deposito.

Gambar 4.2
Uji t – PDB per kapita (X1)



b. Pengujian Terhadap Koefisien Regresi Suku Bunga Nominal (X2)

$H_0 : \beta_2 = 0$ Secara individu variabel suku bunga nominal (X2) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito (Y).

$H_a : \beta_2 > 0$ Secara individu variabel suku bunga nominal (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito (Y)

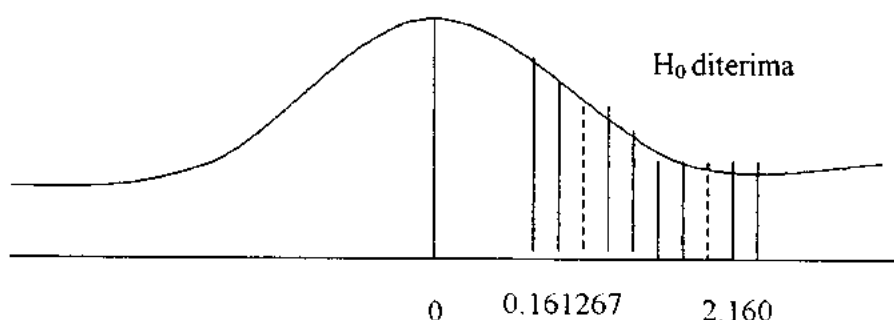
Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel suku bunga nominal (X2) tidak mempengaruhi jumlah deposito (Y) secara signifikan. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya adalah variabel suku bunga nominal (X2) mempengaruhi jumlah Deposito (Y) secara signifikan positif.

Tanda koefisien regresi suku bunga nominal (X2) yang digunakan adalah sebesar 0.015469 dan dari hasil perhitungan regresi

diperoleh nilai t -hitung sebesar 0.079021 dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh nilai t -tabel sebesar 2.160. Karena t -hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa suku bunga nominal (X_2) tidak mempengaruhi deposito (Y) secara signifikan positif.

Gambar 4.3

Uji t – Suku bunga nominal (X_2)



c. Pengujian Terhadap Koefisien Regresi Jumlah Penduduk (X_3)

$H_0 : \beta_3 = 0$... Secara individu variabel jumlah penduduk (X_3) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito (Y).

$H_a : \beta_3 > 0$... Secara individu variabel jumlah penduduk (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito (Y)

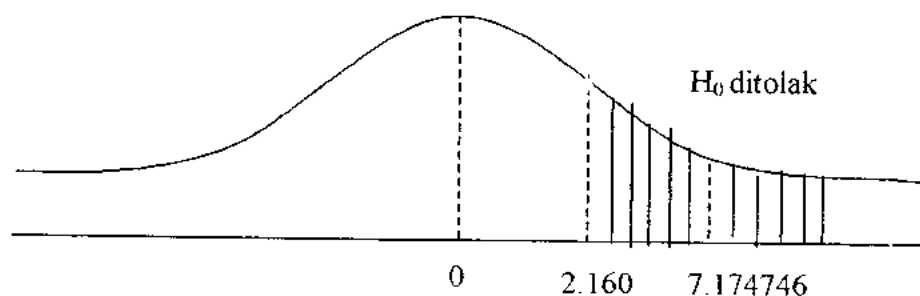
Jika t -hitung $< t$ -tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel jumlah penduduk (X_3) tidak mempengaruhi jumlah deposito (Y) secara signifikan. Jika t -hitung $> t$ -tabel maka H_a diterima dan H_0

ditolak, yang artinya adalah variabel jumlah penduduk (X3) mempengaruhi jumlah deposito (Y) secara signifikan positif

Tanda koefisien regresi jumlah penduduk (X3) yang digunakan adalah yaitu sebesar 21.35648 dan dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar 7.174746 dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 2.160. Karena t-hitung (7.174746) > t-tabel (2.160) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa jumlah penduduk (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah deposito (Y)

Gambar 4.4

Uji t – Jumlah penduduk (X3)



d. Pengujian terhadap koefisien regresi dummy variabel (D)

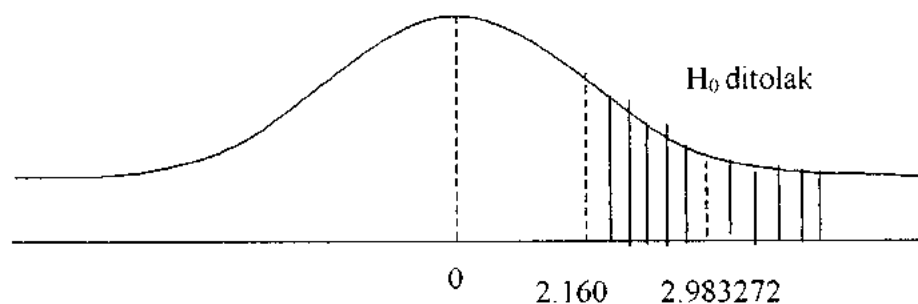
$H_0 : \beta_3 = 0$... Secara individu dummy variabel (D) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito (Y)

$H_a : \beta_3 > 0$... Secara individu dummy variable (D) berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito (Y)

Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya dummy variable (D) tidak mempengaruhi jumlah deposito (Y) secara signifikan. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya adalah dummy variabel (D) mempengaruhi jumlah deposito (Y) secara signifikan.

Tanda koefisien regresi dummy variabel (D) yang digunakan adalah yaitu sebesar 0.707640 dan dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai $t\text{-hitung}$ sebesar 2.983272 dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh nilai $t\text{-tabel}$ sebesar 2.160. Karena $t\text{-hitung}$ (2.983272) $>$ $t\text{-tabel}$ (2.160) maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti bahwa dummy variabel (D) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah deposito (Y)

Gambar 4.5
Uji t – Dummy variabel (D)



4.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berganda (R^2) = 0.978828 dan koefisien determinasi yang disesuaikan ($R\text{-adjusted}$) = 0.972314 menunjukkan bahwa tingkat ketepatan (Goodness of fit) dari hubungan fungsi tersebut adalah

0.978828 yang artinya adalah 97.8 % variabel dependen (deposito) dipengaruhi oleh variabel independen (PDB per kapita, suku bunga nominal, jumlah penduduk dan krisis moneter). Sedangkan sisanya sebesar 2.2 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

4.4. PENGUJIAN ASUMSI KLASIK

4.4.1. Multikolinearitas

Multikoliniearitas adalah keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya, atau dengan kata lain variabel independen yang satu merupakan fungsi dari variabel-variabel independen lainnya. Pada lampiran dapat dilihat bahwa dengan menggunakan bantuan komputer yang sesuai dengan uji Kleins yang dipakai dalam penelitian ini maka dapat diperoleh nilai-nilai yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.1
Uji Multikolinearitas

Variabel	r^2	R^2 keseluruhan	Kesimpulan
LogX1 – LogX2	0.003082	0.978828	Tidak Terjadi Multikoliniearitas
LogX1 – LogX3	0.880972	0.978828	Tidak Terjadi Multikolinearitas
LogX1 – D	0.357350	0.978828	Tidak Terjadi Multikolinearitas
LogX2 – LogX3	0.206035	0.978828	Tidak Terjadi Multikoliniearitas
LogX2 – D	0.146592	0.978828	Tidak Terjadi Multikolinearitas
LogX3 – D	0.605715	0.978828	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Berdasarkan teori yang diajukan Kleins *Rule Of Thumb* menyatakan bahwa, multikolinearitas tidak usah dirisaukan apabila R^2 regresi model lebih besar daripada r^2 regresi antar variabel penjelas, maka setelah dilakukan pengujian dengan komputer maka besarnya r^2 regresi antar variabel penjelas lebih kecil dari pada R^2 model regresi awal. Dari hasil pengujian terhadap multikolinieritas pada masing-masing variabel penjelas diperoleh nilai correlation matrik kurang dari 0.978828 yang berarti tidak terdapat multikolinearitas sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X_1, X_2, X_3, D) tidak terjadi multikolinearitas dalam regresi yang dilakukan.

4.4.2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang sama untuk semua observasi. Akibatnya penaksir OLS tetap tidak bias dan tidak efisien. Heteroskedastisitas dapat di deteksi dengan melakukan uji White. Adapun hipotesis yang diuji adalah :

H_0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_a : Terdapat heteroskedastisitas

Secara manual uji ini dilakukan dengan meregres residual kuadrat (U_i^2) dengan variabel bebas. Dengan ini didapat nilai R^2 untuk menghitung X^2 , dimana $X^2 = n * R^2$. Pengujiannya adalah jika X^2 -hitung < X^2 -table, maka dapat dikatakan dalam persamaan tidak terjadi heteroskedastisitas atau

H_0 diterima, jika X^2 -hitung > X^2 -tabel maka dapat dikatakan terdapat heteroskedastisitas atau H_0 ditolak

Dengan menggunakan $\alpha = 0.05$ dan maka diperoleh X^2 -tabel sebesar 28.869. dari table dibawah ini diketahui X^2 -hitung sebesar 9.662850 dan X^2 -tabel sebesar 28.869, karena X^2 -hitung < X^2 -tabel maka H_0 diterima artinya tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 4.1.2

Uji Heteroskedastisitas Dengan Menggunakan Uji White

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.632188	Probability	0.758862
Obs*R-squared	9.662850	Probability	0.560945

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/29/04 Time: 15:18

Sample: 1985 2002

Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	140.6093	354.6891	0.396430	0.7055
LOG(X1)	-13.80096	59.17112	-0.233238	0.8233
(LOG(X1))^2	1.098199	2.357557	0.465821	0.6578
(LOG(X1))*(LOG(X2))	-2.511773	9.299025	-0.270111	0.7961
(LOG(X1))*(LOG(X3))	-0.966525	4.702126	-0.205551	0.8439
(LOG(X1))*DM	1.379336	3.425455	0.402672	0.7011
LOG(X2)	-35.58820	169.8362	-0.209544	0.8410
(LOG(X2))^2	0.060402	0.168578	0.358302	0.7324
(LOG(X2))*(LOG(X3))	5.877999	24.96403	0.235459	0.8217
(LOG(X2))*DM	-0.343364	1.367921	-0.251012	0.8102
(LOG(X3))*DM	-3.318855	7.349453	-0.451579	0.6674
DM	21.46421	52.21877	0.411044	0.6953
R-squared	0.536825	Mean dependent var	0.035943	
Adjusted R-squared	-0.312329	S.D. dependent var	0.027839	
S.E. of regression	0.031892	Akaike info criterion	-3.818226	
Sum squared resid	0.006102	Schwarz criterion	-3.224645	
Log likelihood	46.36404	F-statistic	0.632188	
Durbin-Watson stat	2.227824	Prob(F-statistic)	0.758862	

4.4.3. Autokorelasi

Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan gangguan (Error disturbance) suatu periode berkorelasi dengan kesalahan sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak ada autokorelasi positif

H_0^* : Tidak ada autokorelasi negatif

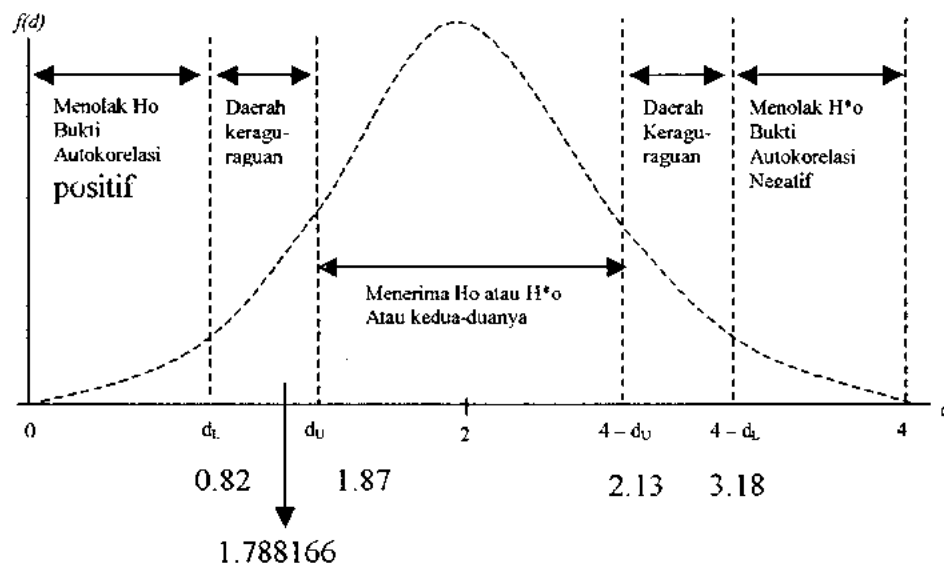
Jika $DW < d_l$ dan $DW > 4 - d_l$, maka H_0 dan H_0^* ditolak

Jika $DW > d_u$ dan $DW < 4 - d_u$, maka H_0 dan H_0^* diterima

Jika $d_l < DW < d_u$ dan $4 - d_u < DW < 4 - d_l$, maka H_0 dan H_0^* berada pada daerah keragu-raguan.

Berdasarkan perhitungan komputer dengan program E-Views maka diperoleh nilai DW sebesar 1.788166 dengan menggunakan $\alpha = 0.05$ maka diperoleh nilai DW untuk d_l sebesar 0.82 dan nilai DW untuk d_u sebesar 1.87. Dari perhitungan komputer yang diperoleh setelah meregresikan data yang ada, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam analisis ini tidak dapat disimpulkan, ini dilakukan dengan melihat nilai DW yang diperoleh sebesar 1.788166 berarti terletak pada daerah keragu-raguan

Gambar 4.6
Uji Durbin Watson



Dari hasil regresi awal diperoleh nilai DW sebesar 1.788166 dan terletak didaerah keragu – raguan. Yang berarti ada tidaknya autokorelasi tidak dapat disimpulkan.

4.5. Interpretasi hasil koefisien regresi

Berdasarkan hasil regresi maka diperoleh nilai dari masing-masing variabel bebas dengan pengujian masing-masing variabel sebagai berikut :

1. Tanda parameter untuk koefisien regresi PDB per kapita adalah sebesar -- 5.082184 dan hasil perhitungan diperoleh besarnya t -hitung = -4.560232 dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ nilai t -tabel = 2.160 karena t -hitung < t -tabel maka PDB per kapita (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap deposito (Y). Berarti masyarakat menyimpan dananya

dalam bentuk deposito berjangka 3 bulan tidak mempertimbangkan besar kecilnya tingkat pendapatannya.

2. Tanda parameter untuk koefisien regresi suku bunga nominal adalah sebesar 0.015469 dan hasil perhitungan diperoleh besarnya t-hitung = -0.079021 dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ nilai t-tabel = 2.160 karena t-hitung < t-tabel maka (X2) tidak berpengaruh secara signifikan positif. Berarti masyarakat menyimpan dananya dalam bentuk deposito berjangka 3 bulan tidak mempertimbangkan besar kecilnya tingkat suku bunga. Kemungkinan lain masyarakat lebih mempertimbangkan faktor keamanan dan pelayanan. Dengan melihat faktor ini masyarakat tetap menyimpan dananya di bank dalam bentuk deposito.
3. Tanda parameter untuk koefisien regresi jumlah penduduk (X3) adalah positif sebesar 21.35648 dan hasil perhitungan diperoleh besarnya t-hitung = 7.174746 dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ nilai t-tabel = 2.160 karena t-hitung > t-tabel maka jumlah penduduk (X3) berpengaruh secara signifikan positif terhadap Deposito (Y). dengan menganggap variable lain tetap jika jumlah penduduk naik 1% deposito berjangka 3 bulan naik sebesar 21.35648 %
4. Tanda parameter untuk koefisien regresi dummy variable (D) adalah positif sebesar 0.707640 dan hasil perhitungan diperoleh besarnya t-hitung = 2.983272 dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ nilai t-tabel = 2.160 karena t-hitung > t-tabel maka dummy variabel (X4) berpengaruh secara signifikan

positif terhadap deposito (Y). Ada perbedaan deposito berjangka 3 bulan sebelum dan sesudah krisis moneter sebesar 0.707640 milyar.

5. Menurut hasil pengujian secara keseluruhan (uji F), nilai F-hitung sebesar 150.2566 lebih besar dari pada F-tabel sebesar 3.34, berarti semua variabel secara keseluruhan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen.
6. Penafsiran koefisien determinan (R^2) sebesar 0.978828, hal ini berarti variabel-variabel bebas dapat menjelaskan sebesar 97.8828 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel pengganggu yang tidak terdapat dalam model.
7. Berdasarkan uji ekonometri tentang penyimpangan asumsi klasik yaitu pada uji multikolinieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi yang hasilnya menunjukkan tidak adanya multikolinieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi didaerah keragu-raguan sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan lolos dari pengujian asumsi klasik.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil estimasi regresi non linier yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan ada dua variabel independen yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap variabel dependen, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada variabel PDB per kapita (X_1) menunjukkan tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap (Y) jumlah deposito pada bank pemerintah. (Ceteris Paribus)
2. Pada variabel tingkat suku bunga (X_2) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap (Y) jumlah deposito pada bank pemerintah.
3. Pada variabel jumlah penduduk (X_3) berpengaruh signifikan positif dan positif terhadap (Y) jumlah deposito pada bank pemerintah. (Ceteris Paribus)
4. Pengujian terhadap uji-F yang diperoleh menghasilkan F-hitung yang lebih besar dari F-tabel. ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen.
5. Pada dummy variable / krisis moneter (D) berpengaruh signifikan dan positif terhadap (Y) jumlah deposito pada bank pemerintah.

6. Penafsiran terhadap koefisien determinasi majemuk (R^2) mempunyai koefisien yang tinggi sebesar 0.947921%. Ini menunjukkan bahwa 94.7921 % variabel independen (X_1, X_2, X_3, D) mampu menjelaskan variabel dependen (Y) yaitu jumlah deposito pada bank pemerintah dan sisanya yang sebesar 5.2079 %, variabel dependen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.
7. Pengujian pelanggaran asumsi klasik yang dilakukan dalam persamaan tersebut tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedastisitas, sedangkan autokorelasi pada daerah keraguan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan terbebas dari pelanggaran asumsi klasik.

5.2 Implikasi

Beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan ada beberapa saran yang dapat disampaikan dengan harapan dapat meningkatnya deposito pada bank pemerintah pada masa – masa yang akan datang antara lain :

1. Kebijakan perbankan harus memperhatikan jumlah penduduk disuatu daerah, sehingga bank dengan mudah mendapatkan nasabah sehingga deposito meningkat.
2. kebijakan perbankan harus memperhatikan tentang perilaku nasabah agar supaya likuiditas perbankan tidak terganggu.

3. bank pemerintah disini diharapkan lebih meningkatkan pelayanannya guna mendapatkan nasabah yang banyak sehingga deposito pada bank tersebut meningkat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.